



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUHAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI



**2026 - 2030**

# **PETA RENCANA** *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>5</b>
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Dasar Hukum dan Kebijakan Nasional .....	6
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Hubungan dengan Dokumen Lain.....	8
1.5. Ruang Lingkup.....	9
1.6. Sistematika Peta Rencana.....	9
<b>BAB II PETA STRATEGI PEMERINTAH DIGITAL DAERAH</b> .....	<b>11</b>
2.1. Visi dan Arah Kebijakan Pemerintah Digital .....	11
2.2. Arah Kebijakan Pemerintah Digital .....	11
2.3. Misi Transformasi Digital Provinsi Sumatera Selatan .....	12
2.4. Tujuan Transformasi Digital Provinsi Sumatera Selatan .....	13
2.5. Sasaran Strategis & Indikator Kinerja Pemerintah Digital .....	14
2.6. Keterkaitan dengan RPJMD dan Strategi Nasional SPBE .....	27
2.7. Prinsip-prinsip Transformasi Digital Daerah .....	28
<b>BAB III EVALUASI KONDISI SAAT INI (AS-IS) SPBE DAERAH</b> .....	<b>29</b>
5.1. Hasil Evaluasi SPBE.....	29
5.2. Kondisi Aktual Implementasi SPBE .....	32
5.3. Organisasi Perangkat Daerah.....	34
5.4. Penerapan Aplikasi Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan .....	36
<b>BAB IV PENGEMBANGAN PEMERINTAH DIGITAL</b> .....	<b>39</b>
4.1. Indikator dan Tingkat Kematangan Pemerintah Digital.....	39
4.2. Pemetaan Matriks Pemerintah Digital.....	40
4.3. Kondisi Saat ini (As-is) Pemerintah Digital .....	52
4.4. Kondisi Existing Pemerintah Digital dengan Pendekatan Imputasi .....	56
<b>BAB V ANALISIS KESENJANGAN (GAP ANALYSIS)</b> .....	<b>60</b>
5.1. Tata Kelola yang Kokoh dan Birokrasi Berbasis Kinerja .....	60
5.2. Kedaulatan Data dan Integritas Informasi .....	60
5.3. Ketahanan Siber yang Teruji dan Responsif.....	60

5.4.	Ekosistem Teknologi yang Efisien dan Berpusat pada Pengguna .....	61
5.5.	Kepuasan Pengguna sebagai Indikator Utama .....	61
5.6.	Analisis Kesenjangan ( <i>Gap Analysis</i> ) Pemerintah Digital .....	64
<b>BAB VI STRATEGI TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAH DAERAH .....</b>		<b>68</b>
6.1.	Strategi Peningkatan Tata Kelola Digital .....	68
6.2.	Strategi Penyelenggaran Pemerintah Digital .....	68
6.3.	Strategi Pembangunan Data .....	72
6.4.	Strategi Keamanan Siber .....	75
6.5.	Strategi Teknologi digital .....	77
6.6.	Strategi Keterpaduan Layanan Digital .....	78
6.7.	Strategi Kepuasan Pengguna .....	81
<b>BAB VII PETA RENCANA PEMERINTAH DIGITAL 2026–2030 .....</b>		<b>68</b>
7.1.	Roadmap Tahunan (2026–2030) .....	83
7.2.	Evaluasi dan Pengukuran Kepuasan Pemerintah Digital .....	87
7.2.1	Pengukuran Penilaian Pemerintah Digital .....	87
7.2.2	Skala Penilaian Kepuasan Pengguna .....	89
7.2.3	Translasi Skala: Menghubungkan Kepuasan Pengguna dengan Tingkat Kematangan .....	91
7.2.4	Konversi Nilai Kepuasan Pengguna ke Tingkat Kematangan .....	93
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>		<b>95</b>
8.1.	Penegasan Visi dan Pijakan Awal Transformasi .....	95
8.2.	Rekomendasi Strategis untuk Kepemimpinan Daerah .....	95
8.3.	Komitmen dan Parameter Keberhasilan .....	96

## DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1. Skema Visi dan Arah Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan 2025–2029.....</i>	<i>27</i>
<i>Gambar 2. Nilai Indeks SPBE Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.....</i>	<i>29</i>
<i>Gambar 3. Struktur Indeks Pemerintah Digital.....</i>	<i>40</i>
<i>Gambar 4. Translasi Skala Menghubungkan Kepuasan Pengguna dengan Tingkat Kematangan .....</i>	<i>91</i>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Visi misi Transformasi Digital Provinsi Sumatera Selatan .....	13
Tabel 2. Peta Sasaran Strategis & Indikator Kinerja Pemerintah Digital .....	14
Tabel 3. Kekuatan dan Kelemahan Aspek Penilaian SPBE Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.....	31
Tabel 4. Kondisi Implementasi SPBE .....	32
Tabel 5. Daftar Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan .....	34
Tabel 6. Daftar Aplikasi Kolaborasi pada Portal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan .....	36
Tabel 7. Indikator dan Tingkat Kematangan Pemerintah Digital .....	39
Tabel 8. Pemetaan Matriks .....	40
Tabel 9. Kondisi Saat Ini (As-Is) .....	52
Tabel 10. Kondisi Ideal (To-be) Pemerintah Digital .....	62
Tabel 11. Kesenjangan (Gap Analysis) Pemerintah Digital .....	65
Tabel 12. Strategi Peningkatan Tata Kelola Digital .....	68
Tabel 13. Strategi Penyelenggaraan Pemerintah Digital .....	71
Tabel 14. Strategi Pembangunan Data .....	72
Tabel 15. Strategi Keamanan Siber .....	75
Tabel 16. Strategi Teknologi Digital .....	77
Tabel 17. Strategi Keterpaduan Layanan Digital .....	78
Tabel 18. Strategi Kepuasan Pengguna .....	81
Tabel 19. Roadmap tahunan (2026-2030) .....	83
Tabel 20. Pengukuran Tingkat Kematangan dengan Skala 5 .....	89
Tabel 21. Skala Penilaian Kepuasan Pengguna .....	89
Tabel 22. Konversi Nilai Kepuasan Pengguna .....	93

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemanfaatan **Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)** di lingkungan pemerintah daerah kini menjadi kebutuhan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Melalui **Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengembangan e-Government**, pemerintah telah memulai langkah transformasi digital untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang **efisien, efektif, transparan, dan akuntabel**.

Perkembangan TIK yang pesat telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, bekerja, dan bertransaksi. Standar layanan yang cepat, mudah, dan berbasis digital kini menjadi tuntutan masyarakat terhadap pemerintah. Publik menuntut layanan yang setara dengan sektor swasta—mudah diakses, terintegrasi, serta dapat dipantau secara terbuka. Hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan **transformasi digital secara menyeluruh** di seluruh aspek Bagian kasi dan pelayanan publik.

Sebagai respon terhadap perubahan tersebut, pemerintah menerbitkan **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** yang menjadi dasar penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital. SPBE menekankan pentingnya integrasi antar-perangkat daerah dan antar-tingkat pemerintahan, serta penggunaan data dan sistem yang saling terhubung untuk mendukung efisiensi Bagian kasi.

Transformasi digital pemerintah kemudian diperkuat dengan **Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional**, yang menegaskan arah pembangunan menuju pemerintahan digital yang terintegrasi (Digital Government). Dalam kerangka ini, teknologi tidak lagi hanya alat bantu administratif, tetapi telah menjadi **penggerak utama reformasi Bagian kasi dan inovasi pelayanan publik**.

Mulai tahun **2026**, pemerintah memperkenalkan **Indeks Pemerintah Digital (IPD)** sebagai pengganti **Indeks SPBE**, untuk mengukur tingkat kematangan digital pemerintah. IPD menilai kemampuan instansi dalam mengelola enam pilar utama:

1. **Tata Kelola Digital**
2. **Manajemen Layanan Digital**
3. **Teknologi dan Infrastruktur Digital**
4. **SDM dan Budaya Digital ASN**
5. **Layanan Publik Digital**
6. **Data dan Kecerdasan Buatan Pemerintah**

Transformasi digital bukan sekadar implementasi aplikasi, melainkan **perubahan sistemik terhadap cara kerja, budaya organisasi, dan pengambilan keputusan berbasis data**. Pemerintah daerah harus memastikan setiap inovasi digital mendukung integrasi layanan, peningkatan kinerja, serta kepuasan masyarakat.

Provinsi Sumatera Selatan, memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan agenda **Pemerintah Digital Indonesia 2045**. Oleh karena itu, penyusunan **Peta Rencana Pemerintah Digital 2026–2030** ini menjadi langkah strategis untuk:

- Menetapkan arah dan prioritas pembangunan digital daerah;
- Mendorong integrasi sistem dan data antar-perangkat daerah;
- Memperkuat kompetensi digital ASN; dan
- Meningkatkan kualitas layanan publik digital yang adaptif dan inklusif.

Dengan adanya peta rencana ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan mampu melaksanakan **transformasi digital yang terarah, terukur, dan berkelanjutan**, menuju Bagian kral yang cerdas dan layanan publik berbasis data bagi seluruh masyarakat.

## 1.2. Dasar Hukum dan Kebijakan Nasional

1. Penyusunan Peta Rencana ini berpedoman pada berbagai regulasi dan kebijakan nasional, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
16. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
18. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE
22. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE
23. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
24. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
25. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1 Maksud:

Menyusun arah kebijakan, strategi, dan peta rencana implementasi **Pemerintah Digital Provinsi Sumatera Selatan** untuk periode 2026–2030 sebagai panduan seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan transformasi digital. Maksud dari Pendampingan Pengembangan Ekosistem SPBE Provinsi Sumatera Selatan memberikan landasan berpikir, standarisasi, pentahapan, dan implementasi bagi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang komprehensif, efisien, efektif, dan terpadu dalam bentuk :

1. Kerangka Pemikiran Dasar (*SPBE Framework*)
2. Rencana Strategis dan Tahapan Pembangunan SPBE Provinsi Sumatera Selatan.

### 1.3.2 Tujuan:

1. Menyediakan acuan strategis bagi Pemerintah Daerah dalam mencapai Indeks Pemerintah Digital (IPD) sesuai target nasional.
2. Mengidentifikasi kondisi eksisting, kesenjangan, serta potensi daerah dalam penguatan tata kelola digital.
3. Menentukan program prioritas digitalisasi yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik.
4. Membangun sinergi lintas sektor dalam pengelolaan data, infrastruktur, dan sumber daya digital.
5. Menjadi dasar perencanaan kegiatan digital dalam RKPD, Renstra OPD, dan dokumen pendukung perencanaan daerah lainnya.

### 1.4. Hubungan dengan Dokumen Lain

Peta Rencana Pemerintah Digital Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026-2030 memiliki keterkaitan erat dan bersifat komplementer dengan dokumen perencanaan lainnya:

1. **RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029:** Peta Rencana ini merupakan **dokumen turunan tematik** yang menjabarkan secara lebih detail strategi dan program prioritas RPJMD, Implementasi Peta Rencana ini berkontribusi langsung pada pencapaian target IKU dan IKD yang relevan dalam RPJMD.
2. **Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah:** Peta Rencana ini menjadi **acuan** utama bagi Perangkat Daerah, terutama Dinas Komunikasi dan Informatika serta OPD terkait lainnya (Bappeda, Bagian Organisasi, BKD, Inspektorat, dll.), dalam menyusun tujuan, sasaran, program, dan kegiatan terkait SPBE dalam Renstra masing-masing.
3. **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD):** Target dan program prioritas dalam Peta Rencana ini akan menjadi **masukan penting** dalam penyusunan RKPD tahunan, memastikan alokasi anggaran dan fokus kegiatan tahunan selaras dengan strategi digital jangka menengah.
4. **Arsitektur SPBE Provinsi Sumatera Selatan:** Peta Rencana ini **berpedoman pada dan sekaligus menjadi dasar implementasi** Arsitektur SPBE (jika sudah/sedang disusun), memastikan keselarasan antara rencana strategis dengan rancangan teknis domain data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan layanan SPBE.
5. **RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045:** Peta Rencana ini merupakan bagian dari pelaksanaan **Tahap I RPJPD**, mendukung pencapaian visi jangka panjang Sumatera Selatan Sejahtera 2045 melalui transformasi tata kelola.

6. **RPJMN Tahun 2025-2029 dan Kebijakan SPBE Nasional:** Peta Rencana ini **diselaraskan** dengan arah kebijakan pembangunan nasional, termasuk target SPBE nasional, DAN agenda transformasi digital.

### 1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Peta Rencana Pemerintah Digital Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026-2030 ini mencakup serangkaian kegiatan strategis dan analitis, meliputi:

1. **Review dan Analisis Kontekstual:** Melakukan tinjauan terhadap dokumen perencanaan strategis yang relevan, termasuk RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, RPJPD 2025-2045, kebijakan SPBE nasional (Perpres 95/2018 dan turunannya), serta Peta Rencana SPBE sebelumnya (jika ada), untuk memastikan keselarasan arah dan mandat.
2. **Evaluasi Kondisi Aktual (As-Is Analysis):** Melakukan penilaian mendalam terhadap kondisi penyelenggaraan SPBE Provinsi Sumatera Selatan saat ini, mencakup analisis hasil evaluasi SPBE terakhir, pemetaan kapabilitas tata kelola, manajemen, infrastruktur, aplikasi, layanan digital, keamanan siber, dan sumber daya manusia TIK.
3. **Identifikasi Kesenjangan (Gap Analysis):** Menganalisis kesenjangan antara kondisi aktual SPBE dengan kondisi ideal yang diharapkan (To-Be) sesuai dengan visi, misi, sasaran strategis pemerintah digital, dan target RPJMD.

**Perumusan Strategi dan Program Kerja:** Merumuskan visi, misi, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi prioritas, serta program kerja/kegiatan strategis pemerintah digital untuk periode 2026-2030 yang menjawab isu strategis dan kesenjangan yang teridentifikasi.

### 1.6. Sistematisasi Peta Rencana

Dokumen Peta Rencana Pemerintah Digital Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026-2030 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN** Menguraikan latar belakang, dasar hukum dan kebijakan nasional yang relevan, maksud dan tujuan penyusunan Peta Rencana, serta ruang lingkup dan pendekatan yang digunakan.
- **BAB II PETA STRATEGI PEMERINTAH DIGITAL DAERAH** Menyajikan Visi dan Arah Kebijakan Pemerintah Digital, Misi Transformasi Digital Provinsi Sumatera Selatan, Sasaran Strategis yang mengacu pada pilar SPBE, penjelasan Keterkaitan dengan RPJMD dan Strategi Nasional SPBE, serta Prinsip-prinsip Transformasi Digital Daerah.

- **BAB III EVALUASI KONDISI SAAT INI (AS-IS) SPBE DAERAH** Memaparkan Hasil Evaluasi SPBE terakhir, Kondisi Aktual Implementasi SPBE di lapangan, gambaran Organisasi Perangkat Daerah terkait SPBE, serta Penerapan Aplikasi Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan yang sudah berjalan.
- **BAB IV PENGEMBANGAN PEMERINTAH DIGITAL** Menjelaskan konsep Pemerintah Digital, dan Kondisi As-is Pemerintah Digital secara lebih mendalam.
- **BAB V ANALISIS KESENJANGAN (GAP ANALYSIS)** Menyajikan Kondisi Ideal penyelenggaraan SPBE yang diharapkan tercapai dan Analisis Kesenjangan antara kondisi ideal tersebut dengan kondisi aktual saat ini.
- **BAB VI STRATEGI TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAH PROVINSI** Merumuskan strategi-strategi kunci untuk periode 2026-2030 yang mencakup Strategi Peningkatan Tata Kelola Digital, Penyelenggaraan Pemerintah Digital, Pembangunan Data, Keamanan Siber, Keterpaduan Layanan Digital, dan peningkatan Kepuasan Pengguna.
- **BAB VIII PENUTUP** Menyajikan rangkuman kesimpulan dari Peta Rencana dan rekomendasi strategis untuk implementasi selanjutnya

## BAB II

### PETA STRATEGI

### PEMERINTAH DIGITAL DAERAH

#### 2.1. Visi dan Arah Kebijakan Pemerintah Digital

Visi Pemerintah Digital Provinsi Sumatera Selatan Visi Pemerintah Digital merupakan derivasi strategis dari Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, yaitu: **"SUMATERA SELATAN MAJU TERUS UNTUK SEMUA"**.

Dalam konteks transformasi digital, Visi ini diterjemahkan sebagai upaya mewujudkan *"Ekosistem Pemerintahan Digital yang Terpadu, Inovatif, dan Berkelanjutan untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Hijau dan Pelayanan Publik yang Inklusif"*.

Kata kunci dalam Visi ini memiliki makna spesifik dalam peta jalan digital daerah:

- **Maju:** Mengacu pada peningkatan daya saing daerah melalui transformasi ekonomi dan birokrasi yang didukung oleh inovasi teknologi informasi, riset, dan digitalisasi sektor unggulan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
- **Terus:** Bermakna keberlanjutan (*sustainability*) dalam penerapan sistem digital yang mendukung prinsip ekonomi hijau (*green economy*) dan ketahanan terhadap perubahan iklim, serta konsistensi dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
- **Untuk Semua:** Menekankan pada inklusivitas infrastruktur dan layanan digital yang merata, menjamin konektivitas antarwilayah, serta memastikan seluruh lapisan masyarakat Sumatera Selatan mendapatkan akses pelayanan publik yang setara dan berkeadilan.

#### 2.2. Arah Kebijakan Pemerintah Digital

**Arah Kebijakan Pemerintah Digital** Arah Kebijakan Pemerintah Digital ditetapkan untuk mendukung pencapaian **Misi ke-4 RPJMD 2025-2029**, yaitu *"Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Inovatif dan Akuntabel"*.

Strategi utama difokuskan pada percepatan transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan rincian arah kebijakan sebagai berikut:

- **Pemerataan Infrastruktur dan Konektivitas Digital:** Memperluas jangkauan infrastruktur telekomunikasi dan internet untuk mendukung konektivitas antarwilayah, guna mengurangi kesenjangan digital dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang merata.

- **Transformasi Digital dan Integrasi Sistem Pemerintahan (SPBE):** Mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara menyeluruh melalui integrasi proses bisnis dan data antar Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan berbasis kinerja ("Birokrasi Berkelas Dunia").
- **Penguatan Satu Data dan Inovasi Pelayanan Publik:** Mengoptimalkan tata kelola data (Satu Data Indonesia tingkat daerah) sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan yang akurat, serta mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi yang memudahkan masyarakat dan dunia usaha.
- **Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (Smart ASN):** Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi digital Aparatur Sipil Negara (ASN) agar mampu beradaptasi dengan teknologi terkini, mendukung manajemen talenta, serta menciptakan budaya kerja yang lincah (*agile*) dan berorientasi pelayanan.

### 2.3. Misi Transformasi Digital Provinsi Sumatera Selatan

Untuk mewujudkan Visi, ditetapkan tiga Misi Transformasi Digital yang menjadi pilar strategis, selaras dengan **Misi Ke-4 RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029** ("Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Inovatif dan Akuntabel"):

1. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, dan Terintegrasi (SPBE):** Misi ini berfokus pada penguatan reformasi birokrasi melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara menyeluruh. Upaya ini mencakup integrasi proses bisnis lintas Perangkat Daerah untuk menghilangkan sekat-sekat birokrasi, serta digitalisasi tata kelola (seperti perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas kinerja) guna menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
2. **Digitalisasi Pelayanan Publik yang Prima, Cepat, dan Menjangkau Semua:** Misi ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar memenuhi standar pelayanan minimal dan harapan masyarakat. Fokus utamanya adalah transformasi layanan menjadi lebih cepat, murah, dan mudah diakses melalui platform digital yang inklusif, sehingga mampu meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat serta daya saing daerah dalam kemudahan berusaha (investasi).
3. **Penguatan Kapasitas SDM Aparatur (Smart ASN) dan Budaya Inovasi Birokrasi:** Misi ini menekankan pada pembangunan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak transformasi. Hal ini dicapai melalui peningkatan kompetensi digital ASN, penerapan manajemen talenta, dan penciptaan budaya kerja yang inovatif serta adaptif terhadap perubahan teknologi. Tujuannya adalah mencetak birokrat yang profesional dan mampu melahirkan solusi inovatif bagi permasalahan pembangunan daerah.

**Tabel 1. Visi misi Transformasi Digital Provinsi Sumatera Selatan**

Visi	Misi
<b>Bersama Membangun Sumatera Selatan Simpun, Maju, dan Berkelanjutan</b>	1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan
	2. Mewujudkan Peningkatan Kesehatan yang Berkualitas, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Keagamaan serta Kualitas SDM
	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
	5. Penataan Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan
	6. Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas

#### 2.4. Tujuan Tranformasi Digital Provinsi Sumatera Selatan

Tujuan Pemerintah Digital ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dari pelaksanaan Misi Transformasi Digital, yang secara langsung mendukung pencapaian indikator kinerja utama daerah (IKU) dalam RPJMD 2025-2029.

1. **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Terpadu dan Akuntabel (Smart Governance)** Tujuan ini berfokus pada reformasi manajemen birokrasi melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang matang. Target utamanya adalah pencapaian predikat Indeks SPBE "**Sangat Baik**" yang didukung oleh:
  - o Penyelesaian Arsitektur SPBE Daerah yang terintegrasi penuh.
  - o Implementasi *Shared Services* (Layanan Berbagi Pakai) untuk efisiensi belanja TIK.
  - o Penguatan aspek kelembagaan dan kebijakan yang menjamin interoperabilitas sistem antar Perangkat Daerah, sehingga tercipta birokrasi yang lincah (*agile*) dan efisien secara anggaran.
2. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima, Inklusif, dan Berdaya Saing (Smart Living)** Tujuan ini mengukur dampak nyata digitalisasi terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemudahan berusaha. Transformasi layanan dasar (Pendidikan, Kesehatan) dan layanan perizinan menjadi prioritas untuk:
  - o Mengurangi biaya transaksi dan waktu layanan bagi masyarakat.
  - o Menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan digital.



		Keterampilan SDM									
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,64	12,80 – 12,81	12,89 – 12,90	12,97 – 13,00	13,07 – 13,10	13,5 – 13,51	13,6 – 13,7
			Persentase Kab/Kota standar literasi	%	5,88	5,88 – 11,76	8,82 – 13,23	11,76 – 14,70	14,71 – 16,17	17,65 – 17,65	19,12 – 20,59
			Persentase Kab/Kota standar numerasi	%	0,00	5,88	1,47 – 7,35	2,94 – 8,82	4,41 – 10,29	5,88 – 11,76	7,35 – 13,23
			Persentase Satuan Pendidikan standar literasi	%	36,67	65,01	93,34	100	100	100	100
			Persentase Satuan Pendidikan standar numerasi	%	33,81	40,12	54,11	68,10	82,09	96,08	100
			Persentase Lulusan Vokasi bekerja <1 tahun	%	80,89	82,54	82,59	82,59	84,29	85,98	87,68
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	72,24	73,00	73,50	74,00	74,50	75,00	75,50
		1.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,26	74,48	74,71	74,91	75,17	75,40	75,63

			Prevalensi Stunting balita	%	15,80	14,80	13,80	12,90	12,10	11,30	10,60	
		1.3	Meningkatnya Pembangunan Sektor Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	54,00	55,45	56,89	58,34	59,78	61,63	62,67
			Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	479	465	453	441	428	416	403	
		1.4	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	93,87	93,93 – 93,99	93,99 – 94,10	94,07 – 94,18	94,13 – 94,21	94,19 – 94,29	94,25 – 94,38
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	61,90	64,00	66,00	68,00	70,00	72,00	74,00	
<b>2</b>	Pertumbuhan Ekonomi			%	5,03	5,3 - 5,5	5,8 - 6,3	5,9 - 6,4	6,0 - 6,5	7,4 - 8,1	7,4 - 8,1	
	PDRB per Kapita			Rp (Juta)	75,13	79,90	94,00	104,00	120,00	127,10	127,10	
	Kontribusi PDRB Provinsi			%	3,02	3,06	3,09	3,11	3,14	3,30	3,30	
	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah			%	n/a	1,41	1,42	1,43	1,44	1,45	1,46	

	Metropolitan										
	Indeks Entropy Theil			Indeks	1,339 (2023)	1,32	1,28	1,24	1,20	1,17	1,12
	Indeks Daya Saing Daerah			Indeks	3,46	3,48	3,50	3,52	3,55	3,60	3,65
		2.1 Meningkatkan pengembangan potensi ekonomi sektor unggulan daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, Perikanan	%	2,59	2,70	2,82	2,95	3,09	3,24	3,40
			Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalangan	%	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman	%	2,01	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50
		2.2 Meningkatkan investasi dan perdagangan daerah	1. Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PMTB)	%	31,01	30,5	31,16	31,23	31,31	31,98	31,98

			2. Persentase Pertumbuhan Investasi	%	49,37	7,50	7,50	7,70	7,80	8,00	8,20
			3. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	13,85	13,92	13,99	14,06	14,13	14,20	14,27
			4. Ekspor Barang dan Jasa (PDRB %)	%	16,84	21,26	21,58	21,89	22,21	22,52	22,84
			5. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	%	5,8	7,13	7,00	6,88	6,76	6,64	6,52
			6. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	0,48	0,53	0,58	0,64	0,70	0,77	0,85
		2.3 Terwujudnya stabilitas ekonomi makro daerah	1. Tingkat Inflasi	%	1,2	1,5–3,5	1,5–3,5	1,5–3,5	1,5–3,5	1,3–3,2	1,3–3,2
			2. Inklusi Keuangan	%	75,02	94,46	94,93	95,4	95,87	96,35	96,82
			3. Indeks Akses Keuangan	Indeks	3,65	3,72	3,75	3,79	3,82	3,85	3,87

			Daerah (IKAD)								
<b>3</b>	<b>Terwujudnya keterkaitan ketahanan pangan, ketahanan energi dan kedaulatan air</b>	1. Indeks Ekonomi Hijau Daerah		Indeks	n/a	62,22	62,63	63,05	63,46	63,89	64,28
		2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)		Indeks	n/a	20,19	21,99	23,79	25,59	27,39	29,19
		3.1 Meningkatnya ketahanan pangan, energi, dan air	1. Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	74,07	77,52	79,79	82,08	84,38	86,69	89,01
			2. Porsi EBT dalam bauran energi primer	%	23,15	23,10	23,70	24,30	24,70	25,10	25,70
			3. Rasio Elektrifikasi	%	99,9	100	100	100	100	100	100
			4. Persentase Desa Berlistrik	%	99,26	100	100	100	100	100	100
			5. Kapasitas air baku	m <sup>3</sup> /detik	2,22	2,24	2,46	2,69	2,91	3,14	3,36

			6. Indeks Ketahanan Air Provinsi	Indeks	n/a	3,57	3,65	3,74	3,82	3,90	3,98
		3.2 Meningkatnya pengembangan hilirisasi berbasis sektor unggulan	1. Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	18,27	18,90	19,53	20,03	20,53	21,11	21,67
			2. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	%	4,39	5,15	5,16	5,17	5,18	5,19	5,20
			3. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	%	n/a	2,34	2,39	2,44	2,49	2,54	2,59
<b>4</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan</b>			Indeks	72,69	68,19	68,44	68,70	68,95	69,20	69,46
	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)										
	2. Penurunan Intensitas Emisi GRK			%	68,10	69,97	65,48 – 68,68	76,42	79,69	80,74	83,55
	3. Indeks Pengelolaan			Indeks	n/a	465	469	473	477	482	486

	Keaneekaragaman Hayati										
		4.1 Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	%	n/a	18,50	19,41	20,52	21,77	22,87	24,12
			Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	%	20,30	31,02	34,50	39,97	45,01	44,59	49,84
<b>5</b>	<b>Meningkatnya kualitas konektivitas daerah</b>	1. Rasio Konektivitas		Rasio	630	634	660	685	710	735	760
		5.1 Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Konektivitas yang berkualitas	Waktu Tempuh Jalan Provinsi	Jam/100 km	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
			V/C Rasio Jalan	Rasio	392	390	388	385	383	382	381
			Rata-rata load factor penumpang angkutan umum	%	70,00	71,00	71,50	72,00	72,50	73,00	73,50

		6.1 Meningkat nya akses air minum dan sanitasi	Akses Air Minum Layak	%	38,25	40,95	43,14	45,62	48,09	50,57	53,04
			Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak	%	87,23	89,30	90,35	92,76	95,18	97,59	100
			Rumah Tangga Perkotaa n terhadap Air Minum Perpipaa n	%	77,34	80,54	82,43	84,32	86,22	88,11	90,00
		6.2 Meningkat nya akses hunian layak, terjangkau , dan berkelanju tan	Persentas e Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	23,93	34,00	38,00	40,50	43,00	43,10	43,20
<b>6</b>			Persentas e Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangka u dan Berkelanj utan	%	40,04	65,01	68,60	69,60	70,60	71,60	72,60
	1. Persentase Bangunan Gedung, Hunian										

	dan Permukiman yang Akses Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan										
<b>7</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Bencana</b>	1. Indeks Resiko Bencana (IRBI)**		Indeks	131,05	130,41	129,78	129,14	128,51	127,88	127,24
		7.1 Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44
<b>8</b>	<b>Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat</b>	1. Tingkat Kemiskinan		%	10,51	9,37–10,37	9,07–10,07	7,90–8,90	7,00–7,85	6,05–7,05	5,95–6,95
		2. Rasio Gini		Indeks	331	0,316–0,320	0,312–0,316	0,305–0,309	0,300–0,304	0,294–0,298	0,294–0,298
		8.1 Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,86	3,82–3,93	3,75–3,90	3,70–3,85	3,70–3,80	3,29–3,67	3,16–3,61
			Tingkat Partisipasi Angkatan	%	70,82	70,83	70,84	70,85	70,86	70,87	70,88

			Kerja (TPAK)								
			Rasio Kewirausahaan	%	2,51	2,57	2,60	2,65	2,70	2,83	2,83
			Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi	%	0,40	0,41	0,42	0,42	0,43	0,44	0,44
		8.2 Meningkatkan Upaya Perlindungan Sosial	Persentase Kemiskinan Ekstrem	%	0,59	0,34	0,20	0,11	0,07	0,04	0,02
			Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	57,12	57,22	57,32	57,52	57,72	57,92	58,12
<b>9 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan</b>	1. Indeks Reformasi Birokrasi	9.1 Meningkatnya kualitas dan kapabilitas birokrasi	Nilai SAKIP	Nilai	BB (74,73)	BB (75–76)	BB (76–77)	BB (77–78)	BB (78–79)	BB (79–80)	BB (80–81)
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Manajemen Risiko Indeks	Indeks	2,866	2,923	2,982	3,041	3,102	3,164	3,228
			Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	1,89 (Sedang)	1,95 (Sedang)	2,02 (Sedang)	2,09 (Sedang)	2,15 (Sedang)	2,21 (Sedang)	2,28 (Sedang)
			Indeks Integritas Daerah	Indeks	60,63	72,66	75,13	77,6	80,07	82,54	85

		9.2 Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayana n Publik	Indek s	A (4,60) Pelaya nan Prima	A (4,60 )	A (4,65 )	A (4,70 )	A (4,75 )	A (4,80 )	A (4,85 )
			Indeks Pembang uan Teknologi Informasi dan Komunika si	Indek s	5,88	5,9	6,08	6,26	6,44	6,8	6,82
			Indeks Reformas i Birokrasi	Indek s	n/a	6,50	6,60	6,70	6,80	6,90	7,00
<b>10 Terwuju dnya stabilitas sosial</b>	1. Indeks Harmoni Indonesia (Sumatera Selatan)	10.1 Menguatn ya Ketentera man di Masyaraka t	Indeks Kerukuna n Umat Beragam a (IKUB)	Indek s	76,82	78,01	78,15	78,35	78,53	78,85	79,10
			Proporsi Pendudu k yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalny a	%	70,82 (2020)	70,82	71,69	72,56	73,43	74,30	75,16
	2. Indeks Pengemban gan Kebudayaa n	10.2 Meningkat nya Pembangu nan Kebudaya an	Indeks Pembang uan Kebudaya an	Indek s	57,51	58,71	59,81	59,91	60,01	60,89	61,10

**Indeks SPBE dan Indeks Pemerintahan Digital (Indeks Pemdi):** Peningkatan target pada indikator ini merefleksikan ambisi Provinsi Sumatera Selatan untuk naik kelas dari predikat "**Baik**" (**Indeks 3,00 di tahun 2024**) menuju predikat "**Sangat Baik**".

- **Implikasi:** Pencapaian ini menuntut peralihan fokus dari sekadar *pengembangan aplikasi* menjadi *penguatan integrasi*. Dinas Kominfo harus memimpin implementasi **Arsitektur SPBE** yang mewajibkan seluruh aplikasi Perangkat Daerah saling terhubung (interoperabilitas) dan berbagi pakai data, sehingga mendukung efisiensi belanja TIK dan pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven policy*).

**Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM):** Kenaikan target ini ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan transformasi digital yang berpusat pada pengguna (*citizen-centric*). Digitalisasi tidak boleh hanya mendigitalkan prosedur lama, melainkan harus memangkas birokrasi.

- **Implikasi:** Target ini mengamanatkan penyederhanaan layanan melalui **Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital** dan portal layanan terpadu. Keberhasilannya diukur dari kemudahan masyarakat mengakses layanan dasar (Kesehatan, Pendidikan, Perizinan) tanpa tatap muka, transparansi biaya, dan kecepatan waktu penyelesaian layanan sesuai Misi ke-6 RPJMD.

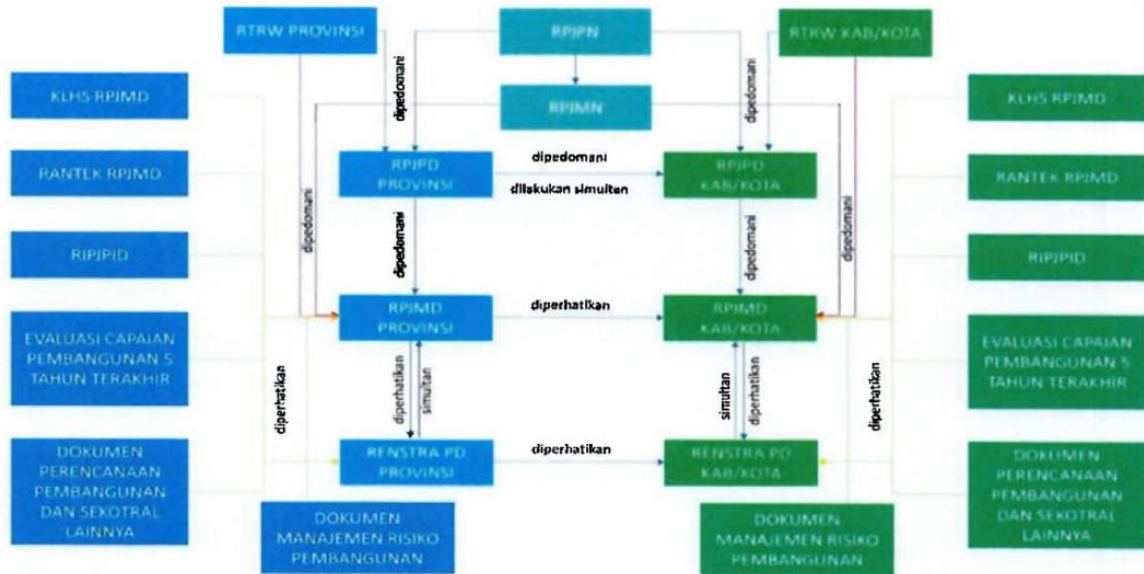
**Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) / Tingkat Keamanan Siber:** Penetapan target yang semakin tinggi pada indikator ini adalah respons wajib terhadap risiko kerentanan data di era digital. Keamanan siber bukan lagi opsi, melainkan fondasi dari kepercayaan publik.

- **Implikasi:** Pemerintah daerah wajib mengalokasikan sumber daya untuk pembentukan dan penguatan **Computer Security Incident Response Team (CSIRT)** daerah, pelaksanaan audit keamanan berkala pada sistem vital, serta penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi untuk menjamin keaslian dan keutuhan dokumen pemerintah.

**Indeks Pembangunan Statistik (IPS):** Indikator ini menjadi tolak ukur kematangan tata kelola data sektoral dalam mendukung program **Satu Data Indonesia** tingkat daerah.

- **Implikasi:** Perangkat Daerah sebagai produsen data wajib menyusun metadata dan standar data yang baku. Peningkatan IPS menjamin bahwa perencanaan pembangunan daerah (seperti penanggulangan kemiskinan dan stunting) didasarkan pada data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan

## 2.6. Keterkaitan dengan RPJMD dan Strategi Nasional SPBE



**Gambar 1. Hubungan Keterkaitan RPJMD**

Peta Strategi Pemerintah Digital Daerah Provinsi Sumatera Selatandirancang sebagai subsistem dari kerangka perencanaan yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun daerah.

- A. **Keterkaitan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan2025-2029:** Strategi ini adalah **instrumental** Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis. Seluruh program di bidang digital, seperti program pengelolaan aplikasi informatika dan penyelenggaraan persandian, adalah *enabler* utama untuk mencapai target IKU seperti **Indeks Reformasi Bagian kral** dan **Nilai SAKIP**. Transformasi digital memastikan bahwa tata kelola pemerintahan yang inovatif bukan hanya slogan, melainkan terwujud dalam sistem kerja yang otomatis dan terintegrasi.
- B. **Keterkaitan dengan Strategi Nasional SPBE (Perpres No. 132 Tahun 2022):** Peta strategi ini mengadopsi empat domain utama dalam Arsitektur SPBE Nasional, yaitu Layanan, Tata Kelola, Manajemen, dan Infrastruktur. Secara spesifik, Sumatera Selatan berkontribusi pada:
  - a. **Penyelenggaraan Layanan SPBE yang Terpadu:** Melalui adopsi layanan aplikasi umum (seperti sistem E-Office dan portal layanan publik) yang terintegrasi dengan Pusat Data Nasional (PDN).
  - b. **Peningkatan Kualitas Data:** Mendukung kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) melalui pembangunan *platform* data terpusat dan penunjukan Wali Data Daerah.
  - c. **Penguatan Keamanan Siber:** Menerapkan fungsi persandian dan membangun ketahanan siber sejalan dengan kerangka keamanan informasi nasional.

## 2.7. Prinsip-prinsip Transformasi Digital Daerah

Keberhasilan implementasi Peta Strategi ini didasarkan pada adherence terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang kuat dan berkelanjutan:

1. **Prinsip Interoperabilitas dan Integrasi (Satu Sistem):** Transformasi harus menghindari pembangunan sistem yang **terisolasi (silo)**. Setiap aplikasi baru atau yang dikembangkan harus terintegrasi secara *mandatori* dengan Arsitektur SPBE Daerah, menggunakan *Application Programming Interface (API)* dan standar data yang disepakati. Tujuannya adalah menghilangkan redudansi data dan aplikasi, serta menciptakan ekosistem *Satu Sistem* yang efisien.
2. **Prinsip Data-Centric dan *Privacy by Design*:** Pengambilan keputusan harus **berbasis data (Data-Driven Policy)** yang valid dan andal (akurat, mutakhir, terpadu). Di saat yang sama, setiap pengembangan sistem harus menjamin **perlindungan data pribadi** masyarakat (*Privacy by Design*), mematuhi regulasi perlindungan data, dan menerapkan standar keamanan tertinggi.
3. **Prinsip Inklusivitas dan Aksesibilitas:** Digitalisasi bukan hanya untuk aparatur, tetapi juga untuk seluruh masyarakat. Prinsip ini memastikan bahwa layanan digital bersifat **aksesibel** bagi semua kalangan (termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan) dan dapat menjangkau daerah dengan keterbatasan infrastruktur (blank spot) melalui solusi teknologi yang adaptif.
4. **Prinsip Adaptif dan Inovatif (*Agile Governance*):** Lingkungan digital berubah cepat. Pemerintah Daerah harus menerapkan tata kelola yang **adaptif (*agile*)** dan terbuka terhadap adopsi teknologi baru (misalnya, AI generatif untuk pelayanan publik) serta perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik kinerja dan survei kepuasan masyarakat.
5. **Prinsip Kolaborasi (*Pentahelix*):** Pengembangan ekosistem digital tidak dapat dilakukan sendiri. Prinsip ini menekankan **kemitraan** yang kuat antara Pemerintah Daerah, masyarakat (komunitas digital), akademisi, sektor swasta, dan media untuk bersama-sama menciptakan dan memanfaatkan inovasi teknologi.

### BAB III

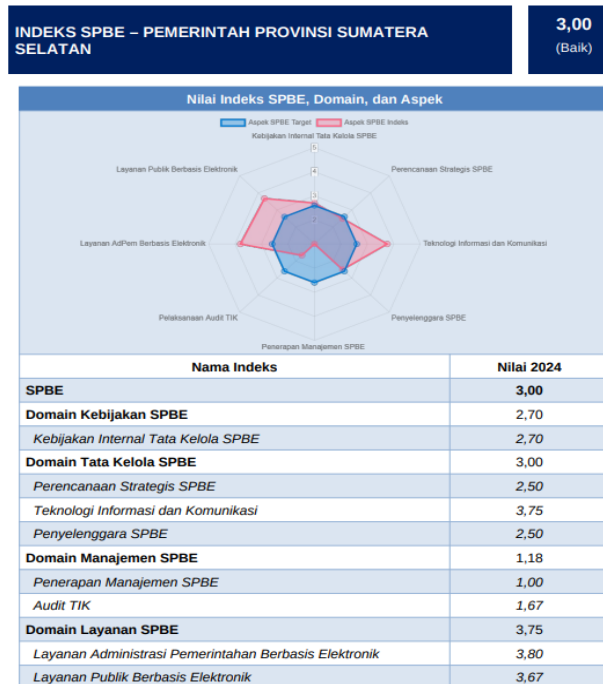
## EVALUASI KONDISI SAAT INI (AS-IS)

### SPBE DAERAH

#### 5.1. Hasil Evaluasi SPBE

Pada tahun 2024, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah melaksanakan evaluasi komprehensif terhadap implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Penilaian ini mengkaji empat domain fundamental, yakni Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen, dan Layanan SPBE. Berdasarkan hasil evaluasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh skor Indeks SPBE sebesar 3,00 dengan predikat "Baik". Detail capaian per domain dan aspeknya divisualisasikan pada tabel dan grafik di atas.

Secara agregat, nilai indeks 3,00 menempatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada kategori kematangan yang baik, mencerminkan bahwa penerapan SPBE sebagian besar telah terpadu dan mendukung kinerja birokrasi serta pelayanan publik. Namun, analisis mendalam terhadap komponen pembentuk indeks menunjukkan adanya ketimpangan (gap) yang cukup tajam antara aspek teknis (Layanan & TIK) dengan aspek manajerial.pada Gambar 2.



**Gambar 2. Nilai Indeks SPBE Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024**

Berikut adalah identifikasi tingkat kematangan pada masing-masing domain berdasarkan data tahun 2024:

**1. Domain Kebijakan SPBE** Domain Kebijakan mencatatkan nilai indeks sebesar **2,70**. Nilai ini mengindikasikan bahwa regulasi internal atau payung hukum terkait tata kelola SPBE telah tersedia, namun pelaksanaannya mungkin belum sepenuhnya optimal atau memerlukan pembaruan agar selaras dengan dinamika kebutuhan digitalisasi terkini. Kebijakan internal tata kelola (2,70) menjadi fondasi yang cukup, tetapi belum mencapai level "Sangat Baik" atau "Memuaskan", yang menyiratkan perlunya reviu regulasi agar lebih implementatif.

**2. Domain Tata Kelola SPBE** Domain ini memiliki nilai komposit sebesar **3,00**, namun terdapat disparitas yang mencolok antar aspek di dalamnya:

- **Kekuatan:** Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi mencatat skor tinggi sebesar **3,75**. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur, aplikasi, dan pusat data daerah sudah sangat matang dan mumpuni.
- **Area Peningkatan:** Aspek Perencanaan Strategis SPBE dan Penyelenggara SPBE sama-sama berada pada nilai **2,50**. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun infrastruktur (TIK) sudah maju, struktur pengorganisasian (Tim Koordinasi SPBE) dan dokumen perencanaan (Peta Rencana SPBE) belum sekuat infrastruktur teknisnya. Sinergi antara perencanaan bisnis dan strategi TIK perlu dipererat kembali.

**3. Domain Manajemen SPBE** Domain Manajemen SPBE menjadi **titik terlemah** dalam arsitektur SPBE Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai indeks hanya **1,18**.

- **Kelemahan Kritis:** Aspek Penerapan Manajemen SPBE berada pada titik nadir dengan nilai **1,00**. Ini menandakan bahwa proses-proses krusial seperti Manajemen Risiko, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, dan Manajemen Layanan hampir belum dijalankan secara sistematis atau masih bersifat *ad-hoc* (insidental).
- **Audit TIK:** Aspek Audit TIK memperoleh nilai **1,67**, yang menunjukkan bahwa mekanisme evaluasi dan audit belum dilakukan secara rutin dan komprehensif untuk menjamin kepatuhan dan kinerja sistem.

**4. Domain Layanan SPBE** Domain Layanan menjadi kontributor nilai tertinggi dengan indeks **3,75**. Ini membuktikan bahwa *output* layanan yang dirasakan pengguna sudah berjalan sangat baik.

- **Layanan Administrasi Pemerintahan (3,80):** Menunjukkan digitalisasi proses bisnis internal (perencanaan, keuangan, kepegawaian, kearsipan) telah terintegrasi dan efisien.
- **Layanan Publik (3,67):** Menandakan bahwa masyarakat telah menikmati kemudahan layanan digital yang bersifat transaksional.

**Kesimpulan dan Rekomendasi Strategis:** Potret Indeks SPBE Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 menunjukkan fenomena *"Strong Front-End, Weak Back-End Process"*. Daerah ini sangat unggul dalam **Produk Layanan** dan **Infrastruktur TIK** (keduanya bernilai >3,7), namun sangat rapuh dalam **Manajemen Proses** (nilai 1,00).

Untuk meningkatkan Indeks SPBE secara signifikan di masa mendatang, strategi utama tidak boleh lagi berfokus pada belanja infrastruktur atau pembuatan aplikasi baru, melainkan harus melakukan **intervensi total pada Domain Manajemen SPBE**. Penguatan Manajemen Risiko, Manajemen Keamanan, dan pelaksanaan Audit TIK secara berkala adalah kunci untuk menyeimbangkan kecanggihan teknologi dengan tata kelola yang *resilient* (tangguh).

Tabel 3 berikut, menunjukkan kekuatan dan kelemahan untuk setiap aspek penerapan SPBE di Provinsi Sumatera Selatan.

**Tabel 3. Kekuatan dan Kelemahan Aspek Penilaian SPBE Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024**

Aspek SPBE	Kekuatan	Kelemahan
<b>A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</b>	Tidak terdapat kekuatan yang menonjol berdasarkan bukti dukung.	Belum ada kebijakan komprehensif terkait Arsitektur SPBE, Peta Rencana, Pembangunan Aplikasi, Audit TIK, dan Tim Koordinasi. Bukti dukung tidak lengkap.
<b>B. Perencanaan Strategis SPBE</b>	Tidak terdapat kekuatan yang menonjol berdasarkan bukti dukung.	Tidak ada bukti keterpaduan rencana–anggaran; tidak ada peta proses bisnis sesuai PermenPANRB 19/2018; Arsitektur & Peta Rencana tidak komprehensif.
<b>C. Teknologi Informasi &amp; Komunikasi</b>	Tidak terdapat kekuatan yang menonjol berdasarkan bukti dukung.	Dokumentasi operasional pemanfaatan layanan pusat data belum komprehensif.
<b>D. Penyelenggara SPBE</b>	Tidak terdapat kekuatan yang menonjol berdasarkan bukti dukung.	Tidak ada bukti pelaksanaan tugas Tim Koordinasi; tidak ada bukti kolaborasi antar perangkat daerah.
<b>E. Penerapan Manajemen SPBE</b>	Tidak terdapat kekuatan yang menonjol berdasarkan bukti dukung.	Belum terlihat penerapan Manajemen Risiko, Keamanan Informasi, Data, Aset TIK, SDM, Pengetahuan, Perubahan, dan Layanan SPBE. Bukti dukung tidak tersedia.
<b>F. Pelaksanaan Audit TIK</b>	Tidak terdapat kekuatan yang menonjol berdasarkan bukti dukung.	Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, dan Audit Keamanan belum ditunjukkan dalam bukti dukung.

<b>G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</b>	Menggunakan aplikasi berbagi pakai pemerintah (SPSE, LPSE, SIMPEG, Srikandi); integrasi basis data & API; bukti dukung lengkap.	Tidak terdapat kelemahan.
<b>H. Layanan Publik Berbasis Elektronik</b>	Penggunaan OSS, Sicantik, JDIH/JDIHN, SP4N Lapor; integrasi basis data & API; bukti dukung lengkap.	Layanan sektor 2 belum memiliki proses verifikasi, validasi, atau integrasi API (baru menyediakan informasi & unduhan dokumen).

## 5.2. Kondisi Aktual Implementasi SPBE

Kondisi kesiapan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan penilaian kematangan Indeks SPBE oleh Kementerian PAN-RB pada tahun 2024 dapat ditunjukkan Tabel 4.

**Tabel 4. Kondisi Implementasi SPBE**

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan (2024)
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi (Pusat/Pemerintah Daerah)	2
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi (Pusat/Pemerintah Daerah)	2
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	4
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi (Pusat/Pemerintah Daerah)	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi (Pusat/Pemerintah Daerah)	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	2
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi (Pusat/Pemerintah Daerah)	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi (Pusat/Pemerintah Daerah)	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi (Pusat/Pemerintah Daerah)	2
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	3
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	4

16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	4
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi (Pusat/Pemerintah Daerah)	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi (Pusat/Pemerintah Daerah)	4
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi (Pusat/Pemerintah Daerah)	3
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	2
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	4
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	5
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	2
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	4

### 5.3. Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditunjukkan oleh Tabel 5 berikut.

*Tabel 5. Daftar Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan*

No	Nama OPD / Dinas
1	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
2	Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel
3	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumsel
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel
8	Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel
9	Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel
10	Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel
11	Dinas Kearsipan Provinsi Sumsel
12	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumsel
13	Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel
14	Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel
15	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel
16	Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel
17	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumsel
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumsel
20	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel
22	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
23	Dinas PU Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumsel

24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel
25	Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel
26	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel
28	Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel
29	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel
30	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel
32	Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumsel
34	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Sumsel
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel
36	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel
37	Badan Penghubung Provinsi Sumsel
38	Badan Kepegawaian Provinsi Sumsel
39	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumsel
40	Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumsel
41	Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumsel
42	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumsel
43	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumsel
44	Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel
45	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumsel
46	Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumsel
47	Biro Organisasi Setda Provinsi Sumsel
48	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Daerah Provinsi Sumsel
49	RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumsel
50	RSJ Ernaldi Bahar Provinsi Sumsel

51	RS Khusus Mata Provinsi Sumsel
52	RS Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumsel

#### 5.4. Penerapan Aplikasi Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan

Di setiap OPD mempunyai website yang bisa menjadi media informasi tiap-tiap OPD dan aplikasi internal administrasi pemerintahan dan layanan publik yang ada di Provinsi Sumatera Selatan seperti ditunjukkan tabel 6.

**Tabel 6. Daftar Aplikasi Kolaborasi pada Portal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan**

No.	OPD Pengelola	Aplikasi	Platform / URL	Status
1	Dinas Pendidikan	Dapodik	<a href="https://dapo.kemdikbud.go.id/">https://dapo.kemdikbud.go.id/</a>	Aktif
2	Dinas Pendidikan	Rumah Belajar	<a href="rumahbelajar.btikp.sumselprov.go.id">rumahbelajar.btikp.sumselprov.go.id</a>	Aktif
3	Dinas Kesehatan	Sumsel Tanggap	Android	Aktif
4	Dinas Kesehatan	Web Entri Penomoran Dokumen	<a href="dokdinkes.sumselprov.go.id">dokdinkes.sumselprov.go.id</a>	Aktif
5	Dinas Kesehatan	Web Entri Disposisi Dokumen	<a href="else-dinkes.sumselprov.go.id">else-dinkes.sumselprov.go.id</a>	Aktif
6	Dinas Kesehatan	Tamu Bersurat Tugas	<a href="sifasiantam.sumselprov.go.id">sifasiantam.sumselprov.go.id</a>	Aktif
7	Dinas Kesehatan	Link Pendukung e-Kinerja	<a href="sumseleviden.sumselprov.go.id">sumseleviden.sumselprov.go.id</a>	Aktif
8	Dinas Kesehatan	BPRS	<a href="bprs.sumselprov.go.id">bprs.sumselprov.go.id</a>	Aktif
9	Disperkim	SIMDA Proyek	<a href="simdaproperkim.sumselprov.go.id">simdaproperkim.sumselprov.go.id</a>	Aktif
10	Disperkim	SIM Bangunan Gedung Negara	<a href="temanpintar.sumselprov.go.id">temanpintar.sumselprov.go.id</a>	Aktif
11	Disperkim	Housing Clinic	<a href="housingclinic.sumselprov.go.id">housingclinic.sumselprov.go.id</a>	Aktif

12	Dinas PU Bina Marga & Tata Ruang	Sitarung	<a href="http://sitarung.sumselprov.go.id">sitarung.sumselprov.go.id</a>	Aktif
13	Dinas PU Bina Marga & Tata Ruang	SPPR	<a href="http://sppr.sumselprov.go.id">sppr.sumselprov.go.id</a>	Aktif
14	Dinas Sosial	Anjungan Bansos Sriwijaya	<a href="http://anjunganbansos.sumselprov.go.id">anjunganbansos.sumselprov.go.id</a>	Aktif
15	Disnakertrans	Carikerja	<a href="http://carikerja.sumselprov.go.id">carikerja.sumselprov.go.id</a>	Aktif
16	Disnakertrans	e-Pengaduan	<a href="http://epengaduandisnaker.sumselprov.go.id">epengaduandisnaker.sumselprov.go.id</a>	Aktif
17	Dishub	Angkutan Sewa Khusus	<a href="http://e-rekap.dishub.sumselprov.go.id">e-rekap.dishub.sumselprov.go.id</a>	Aktif
18	Dishub	Rekomtek	<a href="http://rekomtek.dishub.sumselprov.go.id">rekomtek.dishub.sumselprov.go.id</a>	Aktif
19	Diskominfo	PPID	<a href="http://ppid.sumselprov.go.id">ppid.sumselprov.go.id</a>	Aktif
20	Diskominfo	Sumsel Satu Data	<a href="http://satudata.sumselprov.go.id">satudata.sumselprov.go.id</a>	Aktif
21	Diskominfo	SP4N Laporan	<a href="http://lapor.go.id">lapor.go.id</a>	Aktif
22	Diskominfo	Simata	Android	Aktif
23	Diskominfo	Storage Data	<a href="http://bcs.sumselprov.go.id">bcs.sumselprov.go.id</a>	Aktif
24	Diskop UKM	ODS Koperasi	<a href="http://nik.depkop.go.id">nik.depkop.go.id</a>	Aktif
25	Diskop UKM	IBS	<a href="http://ibs.sumselprov.go.id">ibs.sumselprov.go.id</a>	Aktif
26	Disbudpar	Genta Informatif Wisata	<a href="http://giwang.sumselprov.go.id">giwang.sumselprov.go.id</a>	Aktif
27	Disbudpar	Dapobud	<a href="http://dapobud.sumselprov.go.id">dapobud.sumselprov.go.id</a>	Aktif
28	Distan	Sisuluh	Android	Aktif
29	ESDM	SIM Kepegawaian	<a href="http://sijaqa.desdm.sumselprov.go.id">sijaqa.desdm.sumselprov.go.id</a>	Aktif
30	DKP	SIHT Nelayan	<a href="http://sihtampan.sumselprov.go.id">sihtampan.sumselprov.go.id</a>	Aktif

31	Dishut	Pantau Karhutla	<a href="http://songket.sumselprov.go.id">songket.sumselprov.go.id</a>	Aktif
32	Dishut	Basis Data Kehutanan	<a href="http://data.dishut.sumselprov.go.id">data.dishut.sumselprov.go.id</a>	Aktif
33	Dinas Kearsipan	Srikandi	<a href="http://srikandi.layanan.go.id">srikandi.layanan.go.id</a>	Aktif
34	DPMPTSP	OSS	<a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a>	Aktif
35	DPMPTSP	Sicantik UI	<a href="http://sicantikui.layanan.go.id">sicantikui.layanan.go.id</a>	Aktif
36	Dukcapil	SIKAK	Intranet	Aktif
37	DLHP	SIMPELLAB	<a href="http://simpellab.sumselprov.go.id">simpellab.sumselprov.go.id</a>	Aktif
38	Bappeda	SIGERTAK	<a href="http://sigertak.sumselprov.go.id">sigertak.sumselprov.go.id</a>	Aktif
39	Bappeda	E-Monev	<a href="http://emonev.sumselprov.go.id">emonev.sumselprov.go.id</a>	Aktif
40	BKD	SIMPEG	<a href="http://simpeq.bkd.sumselprov.go.id">simpeq.bkd.sumselprov.go.id</a>	Aktif
41	Bapenda	e-Samsat / eDempo	Android	Aktif
42	Inspektorat	SI-MERI	<a href="http://si-meri.inspektorat.sumselprov.go.id">si-meri.inspektorat.sumselprov.go.id</a>	Aktif
43	Biro Hukum	JDIH	<a href="http://jdih.sumselprov.go.id">jdih.sumselprov.go.id</a>	Aktif
44	Biro PBJ	LPSE	<a href="http://lpse.sumselprov.go.id">lpse.sumselprov.go.id</a>	Aktif
45	Sekretariat DPRD	SIPEDANG	<a href="http://sipedang.sumselprov.go.id">sipedang.sumselprov.go.id</a>	Aktif
46	Tim Penggerak PKK	Dasawisma	<a href="http://dasawisma.sumselprov.go.id">dasawisma.sumselprov.go.id</a>	Aktif
47	Disperkim	Aplikasi Perumahan	<a href="http://rumahwongkito.sumselprov.go.id">rumahwongkito.sumselprov.go.id</a>	Perbaikan
48	Disperkim	SI Jaringan Publik	<a href="http://sijapub.sumselprov.go.id">sijapub.sumselprov.go.id</a>	Perbaikan
49	Biro Organisasi	e-Performance	<a href="http://eperformance.sumselprov.go.id">eperformance.sumselprov.go.id</a>	Perbaikan

## BAB IV PENGEMBANGAN PEMERINTAH DIGITAL

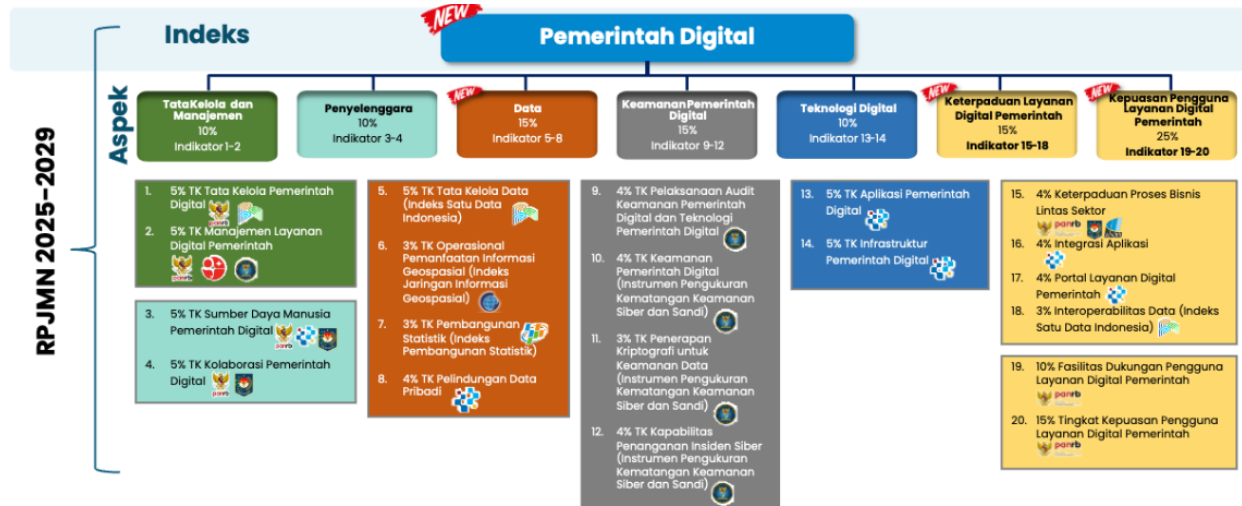
### 4.1. Indikator dan Tingkat Kematangan Pemerintah Digital

Berikut merupakan hasil penilaian awal terhadap tingkat kematangan *Pemerintah Digital* berdasarkan indikator dan aspek yang mengacu pada Indeks SPBE seperti yang ditunjukkan pada tabel 7.

**Tabel 7. Indikator dan Tingkat Kematangan Pemerintah Digital**

No.	Indikator	TK	Indeks SPBE
	<b>Tata Kelola dan Manajemen</b>	<b>1</b>	
1	TK Tata Kelola Pemerintah Digital	1	Aspek 2
2	TK Manajemen Layanan Digital Pemerintah	1	Aspek 5
	<b>Penyelenggara</b>	<b>1</b>	
3	Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital	1	
4	Kolaborasi Pemerintah Digital	1	Ind 20
	<b>Data</b>	<b>1</b>	
5	TK Tata Kelola Data SDI (Indeks SDI)	1	
6	TK Operasional Pemanfaatan Informasi Geospasial (Indeks JIG)	1	
7	TK Pembangunan Statistik (IPS)	1	
8	TK Pelindungan Data Pribadi	1	
	<b>Keamanan Siber</b>	<b>1</b>	
9	TK Pelaksanaan Audit Keamanan Pemerintah Digital dan Teknologi Pemerintah Digital	1	Ind 31
10	TK Keamanan Pemerintah Digital (IKASANDI)	1	Ind 22
11	TK Penerapan Kriptografi untuk Keamanan Data	1	
12	TK Kapabilitas Penanganan Insiden Siber (IKASANDI)	1	
	<b>Teknologi Digital</b>	<b>1</b>	
13	TK Aplikasi Pemerintah Digital	1	Ind 15
14	TK Infrastruktur Pemerintah Digital	1	Ind 16
	<b>Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah</b>	<b>1</b>	
15	Keterpaduan Proses Bisnis Lintas Sektor	1	Ind 14
16	Integrasi Aplikasi	1	
17	Portal Layanan Digital Pemerintah	1	
18	Interoperabilitas Data	1	

	<b>Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah</b>	<b>1</b>	
19	Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	1	
20	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	1	



**Gambar 3. Struktur Indeks Pemerintah Digital**

Gambar 3 di atas menunjukkan struktur Indeks Pemerintah Digital yang merupakan bagian dari RPJMN 2025–2029, terdiri atas enam aspek utama: *Tata Kelola dan Manajemen*, *Penyelenggara*, *Data*, *Keamanan Siber*, *Teknologi Digital*, serta *Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah*. Masing-masing aspek memiliki indikator penilaian yang mendukung pengukuran tingkat kematangan transformasi digital pemerintah.

#### 4.2. Pemetaan Matriks Pemerintah Digital

Berikut disajikan hasil pemetaan matriks berdasarkan aspek, muatan, indikator, dan penanggung jawab utama sebagaimana tercantum pada Tabel 8.

**Tabel 8. Pemetaan Matriks**

No	Aspek	Indikator	Bobot	Deskripsi
1	Tata Kelola dan Manajemen	Tingkat Kematangan Tata Kelola Pemerintah Digital	5%	Tata kelola Pemerintah Digital adalah kerangka strategis yang memandu penerapan Pemerintah Digital dengan memanfaatkan teknologi informasi, untuk memastikan kualitas layanan pemerintah berjalan efektif dan efisien.

				<p>Tata Kelola Pemerintah Digital terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Aksi Nasional Pemerintah Digital, sebagai referensi Rencana Aksi pada Instansi Pusat;</li> <li>2. Rencana Aksi Daerah Pemerintah Digital; dan</li> <li>3. Arsitektur Pemerintah Digital Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (IPPD);</li> </ol> <p>untuk transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan.</p>
2	Tata Kelola dan Manajemen	Tingkat Kematangan Manajemen Layanan Digital Pemerintah	5%	<p>Manajemen Layanan Digital Pemerintah adalah serangkaian proses untuk mendukung penyelenggaraan Layanan Digital Pemerintah yang berkualitas.</p> <p>Manajemen Layanan Digital Pemerintah yang dilaksanakan sesuai rencana aksi terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen Risiko,</li> <li>2. Manajemen Perubahan,</li> <li>3. Manajemen Pengetahuan, dan</li> <li>4. Manajemen Relasi Pengguna.</li> </ol>
3	Penyelenggara	Tingkat Kematangan	5%	Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemerintah

		Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital		<p>Digital adalah Kompetensi Digital ASN yang merupakan bagian dari Kompetensi Teknis ASN yang wajib dimiliki setiap pegawai ASN sesuai dengan jenis jabatan, jenjang jabatan, dan penugasan masing-masing.</p> <p>Kompetensi Digital ASN mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemimpinan Digital (Digital Leadership);</li> <li>2. Kecakapan Digital (Digital Proficiency) yang terdiri dari Keahlian Digital (Digital Mastery) dan Kemahiran Digital (Digital Adeptness);</li> </ol> <p>sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas IPPD.</p>
4	Penyelenggara	Tingkat Kematangan Kolaborasi Pemerintah Digital	5%	Forum Koordinasi Pemerintah Digital merupakan wadah untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan Pemerintah Digital bagi Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, Bersama dan tidak terbatas kepada akademisi, Lembaga penelitian, pelaku usaha, industri, media, komunitas, dan

				<p>organisasi masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri.</p> <p>Forum Koordinasi Pemerintah Digital dimanfaatkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian ide/gagasan, penelitian, kajian, penyelesaian masalah, dan peningkatan kualitas pelaksanaan Pemerintah Digital.</li> <li>2. Penguatan Kebijakan, Tata Kelola, dan Manajemen Layanan Digital Pemerintah.</li> <li>3. Peningkatan Budaya dan Kompetensi Digital ASN.</li> <li>4. Penguatan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data, serta Keamanan Siber.</li> <li>5. Penguatan Teknologi Digital untuk Transformasi Layanan Publik.</li> </ol>
5	Data	Tingkat Kematangan Tata Kelola Data (Indeks Satu Data Indonesia)	5%	Tata Kelola Data adalah Kemampuan/kapabilitas dari IPPD dalam menerapkan Tata Kelola Data melalui serangkaian proses Satu Data Indonesia dengan tujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat

				diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan Layanan Pemerintah.
6	Data	Tingkat Kematangan Operasional Pemanfaatan Informasi Geospasial (Indeks Jaringan Informasi Geospasial)	3%	Operasional Pemanfaatan Informasi Geospasial adalah Kemampuan/kapabilitas dari IPPD dalam memanfaatkan Data Spasial dengan tujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan Layanan Pemerintah.  Indikator penilaian diselaraskan dengan Evaluasi Jaringan Informasi Geospasial (JIG)
7	Data	Tingkat Kematangan Pembangunan Statistik (Indeks Pembangunan Statistik)	3%	Kemampuan/kapabilitas dari IPPD dalam memanfaatkan Data Statistik dengan tujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat

				<p>diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan Layanan Pemerintah.</p> <p>Indikator penilaian diselaraskan dengan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS).</p>
8	Data	Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi	4%	Kemampuan/kapabilitas dari IPPD dalam mengatur, memproses, mengendalikan, dan mengawasi Data Pribadi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Pelindungan Data Pribadi pada Layanan Digital Pemerintah.
9	Keamanan Siber	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan Siber dan Teknologi Pemerintah Digital.	4%	Kemampuan/kapabilitas dari IPPD dalam pelaksanaan Audit Keamanan Siber dan Teknologi Pemerintah Digital di lingkungan IPPD sesuai dengan ketentuan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Keamanan Siber dan Teknologi Pemerintah Digital.
10	Keamanan Siber	Tingkat Kematangan Keamanan Siber (Instrumen	4%	Kemampuan/kapabilitas dari IPPD dalam menyelenggarakan keamanan siber meliputi

		Pengukuran Kematangan Keamanan Siber dan Sandi)		implementasi tata kelola dan manajemen keamanan informasi, serta implementasi kontrol teknis keamanan berdasarkan Instrumen Pengukuran Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (IKASANDI).
11	Keamanan Siber	Tingkat Kematangan Penerapan Kriptografi untuk Keamanan Data (Instrumen Pengukuran Kematangan Keamanan Siber dan Sandi)	3%	Kemampuan/kapabilitas dari IPPD dalam melakukan proteksi keamanan kerahasiaan data melalui penerapan fungsi kriptografi yang bersesuaian dengan standar keamanan modul kriptografi dan penerapan kriptografi secara nasional, baik untuk posisi data ketika disimpan (at-rest), digunakan (in-use), sampai pada data dipertukarkan (in-transit), dalam penyelenggaraan Layanan Digital Pemerintah.
12	Keamanan Siber	Tingkat Kematangan Kapabilitas Penanganan Insiden Siber (Instrumen Pengukuran Kematangan Keamanan Siber dan Sandi)	4%	Kemampuan/kapabilitas dari IPPD dalam Penanganan Insiden Siber secara komprehensif, terstruktur, dan terstandar, termasuk di dalamnya memanfaatkan Tim Tangap Insiden Siber (TTIS) atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di Instansi

				masing-masing hingga kolaborasi dengan TTIS Nasional.
<b>13</b>	Teknologi Digital	Tingkat Kematangan Aplikasi Pemerintah Digital	5%	<p>Aplikasi Pemerintah Digital adalah aplikasi, sistem informasi, sistem elektronik, platform digital, atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Aplikasi Pemerintah Digital adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk menyelenggarakan dan/atau menghasilkan Layanan Digital Pemerintah.</p> <p>Pembangunan/ pengembangan aplikasi merupakan suatu proses yang bersifat komprehensif sesuai dengan siklus pengembangan aplikasi (Software Development Life Cycle/SDLC) yang selaras dengan Arsitektur Teknologi Pemerintah Digital, dengan menerapkan prinsip-prinsip pelaksanaan Pemerintah Digital.</p>
<b>14</b>	Teknologi Digital	Tingkat Kematangan Infrastruktur	5%	Infrastruktur Pemerintah Digital adalah semua perangkat keras,

		<p>Pemerintah Digital</p>	<p>perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjelaskan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.</p> <p>Kemampuan/kapabilitas dari IPPD dalam menyelenggarakan Layanan Digital IPPD dengan mengutamakan Teknologi Awan (Cloud Technology) melalui pemanfaatan penyelenggaraan Infrastruktur Pemerintah Digital.</p> <p>Infrastruktur Digital Pemerintah merupakan bagian dari ekosistem Pemerintah Digital, terdiri atas fasilitas Infrastruktur Pemerintah Digital dan jaringan Infrastruktur Pemerintah Digital.</p> <p>Fasilitas Infrastruktur Pemerintah Digital terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pusat Data Nasional;</li> <li>2. Pusat Komputasi; dan</li> <li>3. Pusat Kendali.</li> </ol>
--	--	---------------------------	--

				<p>Jaringan Infrastruktur Pemerintah Digital terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaringan Intra Pemerintah;</li> <li>2. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;</li> <li>3. Jaringan Intra Pusat Data Nasional; dan</li> <li>4. Jaringan Eksternal Pemerintah.</li> </ol>
15	Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Keterpaduan Proses Bisnis Lintas Sektor	4%	<p>Kemampuan/kapabilitas dari IPPD dalam mewujudkan keterpaduan Layanan Digital Pemerintah melalui keterpaduan proses bisnis Pemerintah Digital berbasis Arsitektur Pemerintah Digital yang berorientasi pada kebutuhan pengguna, yang mencakup penyederhanaan proses bisnis, penggunaan teknologi digital, dan peningkatan efisiensi birokrasi, untuk transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan, dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat untuk setiap aspek kehidupan (Human-Based).</p>
16	Keterpaduan Layanan	Integrasi Aplikasi	4%	<p>Integrasi aplikasi adalah proses menghubungkan berbagai aplikasi dan</p>

	Digital Pemerintah			<p>sistem perangkat lunak agar dapat bekerja sama dan berbagi data secara holistik. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem digita yang terpadu, efisien, dan menghilangkan hambatan operasional yang disebabkan oleh sistem yang terpisah.</p> <p>Dalam konteks Pemerintah Digital, proses ini memastikan bahwa data dan layanan yang ada di berbagai instansi atau unit kerja dapat saling terhubung dan digunakan untuk memberikan layanan publik yang terintegrasi dan efisien kepada masyarakat.</p>
17	Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Portal Layanan Digital Pemerintah	4%	<p>Kemampuan/kapabilitas dari IPPD untuk menyelenggarakan Portal Pelayanan Publik yang mengonsolidasikan seluruh layanan kepada masyarakat di setiap tingkatan Instansi masing-masing, yang selanjutnya terintegrasi menjadi bagian Layanan Digital Pemerintah melalui Pemanfaatan Portal Nasional Pelayanan Publik.</p>

<b>18</b>	Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Interoperabilitas Data (Indeks Satu Data Indonesia)	3%	Kemampuan/kapabilitas dari IPPD dalam mewujudkan keterpaduan data, pengurangan redundansi data, penggunaan teknologi digital, dan peningkatan efisiensi birokrasi.
<b>19</b>	Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	10%	Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah dilakukan untuk mencapai tingkat pemenuhan Kualitas Layanan Digital (Service Level Agreement/SLA) pada IPPD, baik untuk Layanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Digital yang merupakan layanan utama dari Instansi, melalui pemenuhan standar yang telah disepakati dengan pengguna, seperti kecepatan, ketersediaan, dan waktu respons.
<b>20</b>	Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	15%	Pencapaian tingkat kepuasan pengguna terhadap Layanan Digital Pemerintah Instansi, baik untuk Layanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang merupakan layanan berdasarkan tugas dan fungsi utama (proses bisnis utama) di Instansi

				<p>Pusat dan layanan sektoral kepada masyarakat di Pemerintah Daerah, melalui penilaian kepuasan pengguna dengan metode tertentu dan mengutamakan strategi penilaian yang terintegrasi dengan layanan digital.</p>
--	--	--	--	--

### 4.3. Kondisi Saat ini (*As-is*) Pemerintah Digital

Berikut merupakan hasil pemetaan kondisi saat ini (*As-Is*) Pemerintah Digital berdasarkan aspek, indikator, dan kondisi aktual pada masing-masing unit terkait sebagaimana disajikan dalam Tabel 9.

**Tabel 9. Kondisi Saat Ini (*As-Is*)**

No	Aspek	Indikator	Kondisi Aktual
1	Tata Kelola dan Manajemen	Tingkat Kematangan Tata Kelola Pemerintah Digital	Tata kelola pemerintah digital telah berjalan dan didukung analisis data, namun belum diperkuat oleh strategi transformasi digital dan peta rencana yang terdokumentasi secara formal.
2	Tata Kelola dan Manajemen	Tingkat Kematangan Manajemen Layanan Digital Pemerintah	Manajemen layanan digital telah diterapkan pada sebagian perangkat daerah, namun belum distandarkan lintas OPD dan belum terintegrasi dalam satu kerangka layanan terpadu.

3	Penyelenggara	Tingkat Kematangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital	Ketersediaan SDM digital sekitar 5% dari ASN Kominfo, dengan dukungan asesmen keamanan informasi (Indeks KAMI), namun belum mencukupi untuk mendukung seluruh kebutuhan transformasi digital.
4	Penyelenggara	Tingkat Kematangan Kolaborasi Pemerintah Digital	Kolaborasi lintas pemangku kepentingan telah berjalan, termasuk dengan Dewan TIK Daerah, namun belum diformalkan dalam skema kolaborasi berkelanjutan berbasis program prioritas.
5	Data	Tingkat Kematangan Tata Kelola Data (Indeks Satu Data Indonesia)	Tata kelola SDI memiliki landasan hukum yang kuat dan mekanisme berbagi pakai melalui Portal SIMATA, namun interoperabilitas data belum sepenuhnya otomatis dan konsisten.
6	Data	Tingkat Kematangan Operasional Pemanfaatan Informasi Geospasial (Indeks Jaringan Informasi Geospasial)	Pemanfaatan informasi geospasial berada pada kategori baik (IPS 2,72) dengan pembinaan rutin, namun konsistensi dan sinkronisasi data sektoral masih menjadi tantangan.
7	Data	Tingkat Kematangan Pembangunan Statistik (Indeks	Pembangunan statistik menunjukkan kemajuan melalui kerja sama dengan BIG dan

		Pembangunan Statistik)	penerapan standar KSP/SDI, namun pemutakhiran dan integrasi data statistik belum optimal.
8	Data	Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi	Mekanisme pelindungan data pribadi belum tersedia, baik dalam bentuk kebijakan internal, SOP, maupun pengendali teknis.
9	Keamanan Siber	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan Siber dan Teknologi Pemerintah Digital	Audit keamanan siber belum pernah dilaksanakan; instansi baru melakukan asesmen Indeks KAMI dan IKA Sandi secara tahunan dengan tindak lanjut terbatas.
10	Keamanan Siber	Tingkat Kematangan Keamanan Siber (IKASANDI)	Tingkat kematangan keamanan siber berada pada nilai 3,03, namun manajemen risiko keamanan siber belum diterapkan secara menyeluruh.
11	Keamanan Siber	Tingkat Kematangan Penerapan Kriptografi untuk Keamanan Data	Penerapan kriptografi telah dilakukan pada beberapa aplikasi melalui integrasi sertifikat elektronik BSe, namun belum diterapkan secara merata pada seluruh layanan digital.
12	Keamanan Siber	Tingkat Kematangan Kapabilitas	Kapabilitas penanganan insiden telah terbentuk dan terdaftar pada

		Penanganan Insiden Siber	CSIRT Nasional, dengan rata-rata 15–20 insiden ditangani per tahun.
<b>13</b>	Teknologi Digital	Tingkat Kematangan Aplikasi Pemerintah Digital	Terdapat sekitar 158 aplikasi pemerintah digital, namun mayoritas masih dikembangkan secara silo dengan tingkat adopsi arsitektur modern (microservices) sekitar 10%.
<b>14</b>	Teknologi Digital	Tingkat Kematangan Infrastruktur Pemerintah Digital	Infrastruktur pusat data berada pada standar Tier 1 dengan tingkat adopsi cloud sekitar 20%, sehingga belum mendukung kebutuhan skalabilitas dan keandalan layanan digital.
<b>15</b>	Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Keterpaduan Proses Bisnis Lintas Sektor	Keterpaduan proses bisnis lintas sektor belum teridentifikasi dan belum didukung pemetaan proses bisnis terpadu.
<b>16</b>	Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Integrasi Aplikasi	Integrasi aplikasi masih sangat terbatas, baru mencakup sekitar dua aplikasi dan belum menerapkan mekanisme Single Sign-On (SSO).
<b>17</b>	Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Portal Layanan Digital Pemerintah	Portal layanan digital pemerintah belum terintegrasi dalam satu wadah layanan yang

			konsolidatif dan terpadu.
18	Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Interoperabilitas Data (Indeks Satu Data Indonesia)	Interoperabilitas data belum diterapkan secara menyeluruh pada seluruh aplikasi dan layanan digital pemerintah.
19	Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	Fasilitas dukungan pengguna (helpdesk, ticketing, atau kanal pengaduan digital) belum tersedia.
20	Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	Survei dan pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan digital pemerintah belum pernah dilaksanakan.

#### 4.4. Kondisi Existing Pemerintah Digital dengan Pendekatan Imputasi

No.	Indikator	TK	Indeks SPBE
	<b>Tata Kelola dan Manajemen</b>	<b>1,85</b>	
1	TK Tata Kelola Pemerintah Digital	2,7	Aspek 2
2	TK Manajemen Layanan Digital Pemerintah	1	Aspek 5
	<b>Penyelenggara</b>	<b>1,5</b>	
3	Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital	1	
4	Kolaborasi Pemerintah Digital	2	Ind 20
	<b>Data</b>	<b>1</b>	
5	TK Tata Kelola Data SDI (Indeks SDI)	1	

6	TK Operasional Pemanfaatan Informasi Geospasial (Indeks JIG)	1	
7	TK Pembangunan Statistik (IPS)	1	
8	TK Pelindungan Data Pribadi	1	
	<b>Keamanan Siber</b>	<b>1</b>	
9	TK Pelaksanaan Audit Keamanan Pemerintah Digital dan Teknologi Pemerintah Digital	1	Ind 31
10	TK Keamanan Pemerintah Digital (IKASANDI)	1	Ind 22
11	TK Penerapan Kriptografi untuk Keamanan Data	1	
12	TK Kapabilitas Penanganan Insiden Siber (IKASANDI)	1	
	<b>Teknologi Digital</b>	<b>4</b>	
13	TK Aplikasi Pemerintah Digital	4	Ind 15
14	TK Infrastruktur Pemerintah Digital	4	Ind 16
	<b>Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah</b>	<b>1,53</b>	
15	Keterpaduan Proses Bisnis Lintas Sektor	3	Ind 14
16	Integrasi Aplikasi	1	
17	Portal Layanan Digital Pemerintah	1	
18	Interoperabilitas Data	1	
	<b>Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah</b>	<b>1</b>	
19	Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	1	
20	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	1	
	<b>Indeks Pemdi</b>	<b>1,67</b>	

## Analisis Kondisi Existing Pemerintah Digital (Pendekatan Imputasi)

### 1. Gambaran Umum

Indeks Pemerintah Digital Berdasarkan hasil pengukuran kondisi existing dengan menggunakan metode imputasi terhadap indikator-indikator terkait (SPBE, SDI, IKASANDI, dan IPS), diperoleh nilai Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi) sebesar 1,67. Nilai ini menempatkan kematangan Pemerintah Digital pada kategori "Rintisan" (atau Kurang, tergantung skala indeks daerah

masing-masing), yang mengindikasikan bahwa penerapan teknologi digital masih bersifat parsial dan belum didukung oleh ekosistem tata kelola, data, dan keamanan yang memadai.

## 2. Analisis Ketimpangan Domain (Gap Analysis)

Terdapat disparitas (ketimpangan) yang sangat signifikan antar domain pembentuk indeks, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Dominasi Aspek Teknologi Digital (TK 4): Domain Teknologi Digital mencatatkan nilai tertinggi yaitu 4,00. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi infrastruktur (jaringan, pusat data) dan ketersediaan aplikasi, instansi telah memiliki aset yang mumpuni dan terpadu (Indikator 13 & 14). Namun, tingginya nilai teknologi ini menjadi paradoks ketika disandingkan dengan rendahnya nilai pada domain pendukung lainnya (Data, Keamanan, dan SDM). Kondisi ini mengisyaratkan fenomena "Technology Rich, Information Poor" di mana alat tersedia namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan value layanan.
- Kelemahan Kritis pada Domain Data (TK 1): Hasil imputasi dari Indeks Satu Data Indonesia (SDI), Indeks Pembangunan Statistik (IPS), dan tata kelola Geospasial menunjukkan nilai rata-rata 1,00. Ini mengindikasikan bahwa prinsip data-driven policy belum berjalan. Interoperabilitas data (Indikator 18) dan tata kelola data sektoral belum memiliki standar baku, sehingga aplikasi yang bernilai 4 tadi kemungkinan besar masih berupa "silo-silo" aplikasi yang tidak saling bertukar data.
- Kerentanan pada Keamanan Siber (TK 1): Seluruh indikator pada domain Keamanan Siber, mulai dari audit, penerapan kriptografi, hingga penanganan insiden (IKASANDI), berada pada level 1,00. Ini adalah risiko mitigasi tertinggi. Dengan infrastruktur teknologi yang sudah maju (TK 4), ketiadaan lapisan keamanan yang setara (TK 1) membuka celah kerentanan yang sangat besar terhadap serangan siber dan kebocoran data.
- Tata Kelola dan Manajemen Layanan: Meskipun Tata Kelola Pemerintah Digital sudah mulai terbentuk (TK 2,7), aspek Manajemen Layanan Digital masih berada di level 1. Artinya, regulasi mungkin sudah ada, namun standar operasional prosedur (SOP) pelayanan, Service Level Agreement (SLA), dan dukungan pengguna belum terimplementasi.

## 3. Evaluasi Keterpaduan dan Kepuasan Pengguna Indeks Keterpaduan Layanan Digital

tercatat sebesar 1,53. Meskipun proses bisnis lintas sektor sudah mulai terpadu (TK 3), namun integrasi aplikasi, portal layanan, dan interoperabilitas data masih sangat rendah (TK 1). Hal ini berdampak langsung pada Kepuasan Pengguna yang berada pada titik terendah (TK 1). Masyarakat atau pengguna internal belum merasakan dampak kemudahan yang signifikan

meskipun infrastruktur teknologi dinilai tinggi, karena layanan belum terintegrasi dalam satu pintu (portal) dan minim fasilitas dukungan (helpdesk).

#### **4. Kesimpulan Kondisi existing**

menunjukkan bahwa pembangunan digital saat ini terlalu berberat pada belanja teknologi (aplikasi/infrastruktur) namun lemah dalam pembangunan "soft infrastructure" (Data, Keamanan, SDM, dan Regulasi). Pendekatan imputasi data mempertegas bahwa keberhasilan transformasi digital tidak dapat hanya ditopang oleh aplikasi yang canggih (TK 4), melainkan harus segera dilakukan intervensi pada pembenahan kualitas Data (SDI) dan penguatan Keamanan Siber (IKASANDI) untuk menyeimbangkan ekosistem digital.

## BAB V

### ANALISIS KESENJANGAN (GAP ANALYSIS)

#### **Kondisi Masa Depan (*To-Be*): Pemerintah Digital yang Terpadu, Cerdas, dan Melayani**

Visi kondisi masa depan (*To-Be*) Pemerintah Digital menargetkan pencapaian tingkat kematangan "**Terpadu dan Berkesinambungan**" (*Embedded*). Pada fase ini, teknologi digital bukan lagi sekadar alat pendukung, melainkan telah menyatu sepenuhnya dalam mekanisme kerja birokrasi dan pelayanan publik. Transformasi ini ditandai dengan perubahan fundamental pada empat pilar utama:

#### **5.1. Tata Kelola yang Kokoh dan Birokrasi Berbasis Kinerja**

Sistem tata kelola pemerintah digital masa depan telah mapan dan teruji. Rencana Aksi dan Manajemen Layanan tidak lagi bersifat insidental, melainkan telah dilaksanakan secara konsisten selama lebih dari dua tahun dan menjadi landasan mutlak dalam perencanaan serta penganggaran daerah.

- **Penyelarasan Strategis:** Seluruh inisiatif digital telah selaras sepenuhnya dengan RPJMN/RPJPN dan Arsitektur SPBE Nasional, meniadakan program yang tumpang tindih.
- **SDM Digital Unggul:** Birokrasi digerakkan oleh talenta digital yang kompeten, di mana lebih dari **90% ASN** telah memiliki sertifikasi teknis sesuai jabatannya. Budaya kerja baru terbentuk melalui *learning community* yang aktif dan pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) serta analisis data oleh lebih dari 50% pegawai untuk pengambilan keputusan yang presisi.

#### **5.2. Kedaulatan Data dan Integritas Informasi**

Pemerintah daerah telah berhasil keluar dari isolasi data (*data silo*). Kondisi *To-Be* menempatkan data sebagai aset strategis utama dengan standar kualitas tinggi:

- **Satu Data Terintegrasi:** Tata kelola data (SDI), Statistik (IPS), dan Geospasial (JIG) telah mencapai level kematangan tinggi (Indeks > 3,5 hingga 4,0). Data lintas sektor kini terstandarisasi dan dapat dipertukarkan secara *real-time* untuk mendukung kebijakan pembangunan.
- **Perlindungan Privasi:** Penerapan UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) dilakukan secara menyeluruh, dilengkapi mekanisme audit privasi, kontrol teknis yang ketat, dan penanganan risiko yang efektif untuk menjamin hak privasi masyarakat.

#### **5.3. Ketahanan Siber yang Teruji dan Responsif**

Aspek keamanan siber bertransformasi dari sekadar "pelengkap" menjadi "fondasi". Tingkat keamanan dan penanganan insiden (IKASANDI) telah diverifikasi validitasnya oleh lembaga berwenang (BSSN).

- **Pertahanan Berlapis:** Seluruh sistem elektronik kritikal (100%) telah dilindungi oleh teknologi kriptografi minimal pada dua siklus data.
- **Audit dan Penanganan Insiden:** Audit keamanan dilakukan rutin oleh pihak eksternal, dan Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) beroperasi secara aktif serta terintegrasi penuh dengan CSIRT Nasional, menjamin respons cepat terhadap ancaman siber.

#### 5.4. Ekosistem Teknologi yang Efisien dan Berpusat pada Pengguna

Pengembangan teknologi tidak lagi berorientasi pada "banyaknya aplikasi", melainkan pada "kualitas integrasi".

- **Efisiensi Infrastruktur & Aplikasi:** Telah dilakukan rasionalisasi melalui terminasi (penghapusan) aplikasi yang tidak efektif. Aplikasi yang tersisa dikembangkan secara terpadu, direviu berkala, dan infrastrukturnya terintegrasi dengan Pusat Data Nasional.
- **Layanan Tanpa Batas (*Seamless*):** Interoperabilitas data lintas jenjang (Pusat-Provinsi-Kab/Kota) telah berjalan mulus. Layanan publik disajikan melalui **Satu Portal Layanan Digital** yang mencakup seluruh siklus hidup warga, menghilangkan kebingungan masyarakat akibat banyaknya *website* pemerintah.

#### 5.5. Kepuasan Pengguna sebagai Indikator Utama

Puncak keberhasilan transformasi ini diukur langsung dari pengalaman masyarakat. Pemerintah Digital masa depan menargetkan Indeks Kepuasan Pengguna di atas skala **4,0 (Sangat Baik)**. Hal ini dicapai melalui:

- Fasilitas dukungan pengguna (*helpdesk*) yang memenuhi *Service Level Agreement* (SLA).
- Transparansi hasil survei kepuasan dan log perubahan layanan yang dapat diakses publik.
- Forum respons daring yang aktif untuk menampung aspirasi warga.

**Kesimpulan Kondisi *To-Be*:** Secara keseluruhan, kondisi ini menggambarkan pergeseran dari pemerintah yang "**Memiliki TIK**" menjadi pemerintah yang "**Berpikir dan Bekerja secara Digital**". Seluruh elemen—mulai dari data, keamanan, hingga layanan—saling terhubung (interoperabel) untuk menciptakan pelayanan publik yang cepat, aman, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 10. Kondisi Ideal (To-be) Pemerintah Digital**

No	Aspek	Indikator	Kondisi Target (To-Be / Embedded – Sangat Baik)
1	Tata Kelola dan Manajemen	Tingkat Kematangan Tata Kelola Pemerintah Digital	Rencana Aksi Pemerintah Digital telah dilaksanakan secara konsisten lebih dari 2 tahun, menjadi dasar perencanaan dan penganggaran, selaras dengan RPJPN/RPJMN, berbasis Arsitektur Pemerintah Digital, serta direviu secara berkala.
2	Tata Kelola dan Manajemen	Tingkat Kematangan Manajemen Layanan Digital Pemerintah	Manajemen Layanan Digital diterapkan secara konsisten lebih dari 2 tahun dan dilakukan reviu menyeluruh terhadap seluruh Layanan Digital IPPD untuk mendukung transformasi tata kelola pelayanan publik.
3	Penyelenggara	Tingkat Kematangan SDM Pemerintah Digital	>90% ASN telah bersertifikasi sesuai jabatan, peta kompetensi digital diterapkan, komunitas belajar menjangkau >75% ASN, serta pemanfaatan AI & analisis data digunakan oleh >50% ASN untuk peningkatan kinerja.
4	Penyelenggara	Tingkat Kematangan Kolaborasi Pemerintah Digital	Kolaborasi antar IPPD telah direviu secara berkala untuk memastikan efektivitas, kesinambungan, dan kontribusi nyata terhadap capaian Rencana Aksi Pemerintah Digital.
5	Data	Tingkat Kematangan Tata Kelola Data (SDI)	Nilai Indeks Satu Data Indonesia berada pada rentang $70 < SDI < 90$ , menunjukkan tata kelola data telah terstandar, terintegrasi, dan dimanfaatkan lintas sektor.
6	Data	Tingkat Kematangan Pemanfaatan Informasi Geospasial (JIG)	Nilai Indeks Jaringan Informasi Geospasial berada pada rentang $3,50 < JIG < 4,00$ , dengan pemanfaatan geospasial terintegrasi dan konsisten lintas sektor.

<b>7</b>	Data	Tingkat Kematangan Pembangunan Statistik (IPS)	Nilai Indeks Pembangunan Statistik berada pada rentang $3,50 < IPS < 4,00$ , dengan data statistik terintegrasi dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
<b>8</b>	Data	Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi	Pelindungan data pribadi diterapkan menyeluruh, memiliki sistem audit privasi, tindak lanjut risiko, kontrol teknis efektif, serta pelatihan SDM dilakukan secara konsisten.
<b>9</b>	Keamanan Siber	Tingkat Kematangan Audit Keamanan Siber	Audit eksternal keamanan siber telah dilaksanakan pada layanan prioritas aplikasi dan infrastruktur, melengkapi audit internal yang telah berjalan.
<b>10</b>	Keamanan Siber	Tingkat Kematangan Keamanan Siber (IKASANDI)	Hasil pengukuran kematangan keamanan siber telah diverifikasi oleh lembaga berwenang di bidang keamanan siber dan sandi.
<b>11</b>	Keamanan Siber	Tingkat Kematangan Penerapan Kriptografi	Teknologi kriptografi diterapkan minimal pada dua siklus data pada 100% Sistem Elektronik kritikal, serta dilakukan evaluasi menyeluruh secara berkala.
<b>12</b>	Keamanan Siber	Tingkat Kematangan Penanganan Insiden Siber	Tingkat kematangan penanganan insiden siber telah diverifikasi oleh lembaga berwenang dan TTIS IPPD beroperasi aktif serta terintegrasi dengan TTIS Nasional.
<b>13</b>	Teknologi Digital	Tingkat Kematangan Aplikasi Pemerintah Digital	Pengembangan aplikasi dilakukan konsisten, direviu berkala, selaras Arsitektur Pemerintah Digital, serta dilakukan terminasi aplikasi untuk mendukung keterpaduan layanan.
<b>14</b>	Teknologi Digital	Tingkat Kematangan Infrastruktur Pemerintah Digital	Infrastruktur digital terintegrasi dengan Infrastruktur Digital Pemerintah Nasional, direviu berkala, dan mendukung capaian strategis nasional.

15	Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Keterpaduan Proses Bisnis Lintas Sektor	Keterpaduan proses bisnis diterapkan konsisten, direviu berkala, terdokumentasi sebagai arsip digital, dan dimanfaatkan untuk analisis data lintas sektor.
16	Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Integrasi Aplikasi	Integrasi aplikasi dilaksanakan konsisten, terstandarisasi, direviu berkala, dan selaras dengan Arsitektur Pemerintah Digital.
17	Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Portal Layanan Digital Pemerintah	Pemanfaatan Portal Layanan Digital diterapkan penuh dan direviu secara berkala untuk seluruh siklus hidup pengguna.
18	Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Interoperabilitas Data	Integrasi data lintas pusat–provinsi–kabupaten/kota telah berjalan dengan orientasi utama kemudahan pengguna dan layanan publik terpadu.
19	Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	Fasilitas Dukungan Pengguna	Pemenuhan SLA dan fasilitas dukungan pengguna dievaluasi secara menyeluruh dan terintegrasi dengan sistem dukungan tingkat nasional.
20	Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	Tingkat Kepuasan Pengguna	Tingkat kepuasan >4, cakupan responden >70%, forum respons daring rutin, log perubahan layanan tersedia, dan hasil survei dipublikasikan secara terbuka.

### 5.6. Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*) Pemerintah Digital

Analisis kesenjangan dilakukan dengan membandingkan secara sistematis antara Kondisi Ideal (target kinerja tahun 2029) sebagaimana dijelaskan pada subbab 5.1, dengan Kondisi Awal atau *baseline* pembangunan pada tahun 2024 (atau data terakhir yang tersedia) yang telah dipaparkan secara detail dalam Bab II. Kesenjangan (*gap*) ini merepresentasikan tantangan pembangunan yang harus diatasi selama periode RPJMD 2025-2029 melalui implementasi strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang telah dirancang.

Besaran kesenjangan menunjukkan seberapa besar upaya dan sumber daya yang perlu dimobilisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tabel 11.

**Tabel 11. Kesenjangan (Gap Analysis) Pemerintah Digital**

No	Aspek	Indikator	Gap Analisis (Kesenjangan Utama)
1	Tata Kelola dan Manajemen	Tingkat Kematangan Tata Kelola Pemerintah Digital	Belum tersedia strategi transformasi digital dan peta rencana formal yang mengikat lintas OPD serta belum menjadi dasar konsisten perencanaan dan penganggaran berbasis Arsitektur Pemerintah Digital.
2	Tata Kelola dan Manajemen	Tingkat Kematangan Manajemen Layanan Digital Pemerintah	Penerapan manajemen layanan belum seragam lintas OPD, belum mencakup seluruh layanan, dan belum dilakukan reviu berkala berbasis siklus hidup layanan.
3	Penyelenggara	Tingkat Kematangan SDM Pemerintah Digital	Kapasitas dan distribusi SDM digital sangat terbatas, belum berbasis peta kompetensi nasional, sertifikasi digital masih minim, serta pemanfaatan AI dan analisis data hampir belum berjalan.
4	Penyelenggara	Tingkat Kematangan Kolaborasi Pemerintah Digital	Kolaborasi belum diformalkan dalam mekanisme berkelanjutan, tidak berbasis program prioritas, dan belum dievaluasi efektivitas serta dampaknya terhadap capaian transformasi digital.
5	Data	Tingkat Kematangan Tata Kelola Data (SDI)	Interoperabilitas data belum otomatis dan konsisten lintas sektor, standar data belum diterapkan menyeluruh, sehingga nilai SDI belum mencapai kategori terintegrasi tinggi.
6	Data	Tingkat Kematangan Pemanfaatan Informasi Geospasial (JIG)	Integrasi dan sinkronisasi data geospasial antar sektor belum konsisten, pemanfaatan belum sepenuhnya terhubung dengan

			proses pengambilan keputusan lintas OPD.
<b>7</b>	Data	Tingkat Kematangan Pembangunan Statistik (IPS)	Pemutakhiran data statistik belum berkelanjutan, integrasi lintas sektor masih terbatas, dan pemanfaatan statistik sebagai dasar kebijakan belum optimal.
<b>8</b>	Data	Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi	Belum terdapat kebijakan, SOP, DPO tetap, kontrol teknis, maupun mekanisme audit privasi, sehingga risiko kepatuhan dan kebocoran data sangat tinggi.
<b>9</b>	Keamanan Siber	Tingkat Kematangan Audit Keamanan Siber	Belum pernah dilakukan audit keamanan siber internal maupun eksternal secara menyeluruh, sehingga tidak ada validasi independen atas kontrol keamanan layanan kritikal.
<b>10</b>	Keamanan Siber	Tingkat Kematangan Keamanan Siber (IKASANDI)	Manajemen risiko keamanan siber belum menyeluruh dan hasil pengukuran kematangan belum diverifikasi oleh lembaga berwenang.
<b>11</b>	Keamanan Siber	Tingkat Kematangan Penerapan Kriptografi	Penerapan kriptografi masih parsial, belum mencakup seluruh sistem kritikal dan seluruh siklus data, serta belum dilakukan evaluasi berkala.
<b>12</b>	Keamanan Siber	Tingkat Kematangan Penanganan Insiden Siber	Walaupun CSIRT telah terbentuk, tingkat kematangan belum diverifikasi secara formal dan integrasi operasional dengan TTIS Nasional belum optimal.
<b>13</b>	Teknologi Digital	Tingkat Kematangan Aplikasi Pemerintah Digital	Portofolio aplikasi sangat besar dan silo, belum ada terminasi aplikasi, adopsi arsitektur modern rendah, serta review keselarasan arsitektur belum konsisten.

<b>14</b>	Teknologi Digital	Tingkat Kematangan Infrastruktur Pemerintah Digital	Infrastruktur masih terbatas pada Tier 1 dan adopsi cloud rendah, belum terintegrasi dengan Infrastruktur Digital Pemerintah Nasional dan belum direviu berkala.
<b>15</b>	Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Keterpaduan Proses Bisnis Lintas Sektor	Proses bisnis lintas sektor belum dipetakan dan belum terdokumentasi, sehingga digitalisasi masih berbasis aplikasi, bukan transformasi proses.
<b>16</b>	Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Integrasi Aplikasi	Integrasi aplikasi sangat terbatas, belum terstandarisasi, belum menggunakan SSO dan API governance, serta belum direviu keselarasan arsitektur.
<b>17</b>	Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Portal Layanan Digital Pemerintah	Portal belum menjadi single entry point layanan, belum mencakup seluruh siklus hidup pengguna, dan belum dievaluasi secara berkala.
<b>18</b>	Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Interoperabilitas Data	Data masih silo antar aplikasi dan level pemerintahan, pertukaran data belum end-to-end, dan orientasi layanan pengguna belum tercapai.
<b>19</b>	Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	Fasilitas Dukungan Pengguna	Belum tersedia helpdesk, sistem ticketing, SLA, maupun dasbor pemantauan layanan, sehingga kualitas layanan tidak terukur.
<b>20</b>	Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	Tingkat Kepuasan Pengguna	Tidak ada mekanisme survei kepuasan, tidak tersedia data persepsi publik, dan tidak ada publikasi tindak lanjut perbaikan layanan.

## BAB VI

### STRATEGI TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAH DAERAH

#### 6.1. Strategi Peningkatan Tata Kelola dan Manajemen Digital

Berikut merupakan strategi peningkatan Tata Kelola Digital yang disusun berdasarkan hasil identifikasi kondisi eksisting dan kebutuhan penguatan pada masing-masing indikator sebagaimana disajikan dalam Tabel 12.

**Tabel 12. Strategi Peningkatan Tata Kelola dan Manajemen Digital**

NO	Project/Activities	UIC	Nama Kegiatan	Langkah Strategi
1	Tata Kelola Pemerintah Digital	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	1.1 Penyusunan Rencana Aksi PD (Peta Rencana SPBE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan atau revitalisasi Tim Koordinasi SPBE Provinsi.</li> <li>• Identifikasi isu strategis digital dan penyelarasan dengan RPJMD.</li> <li>• Penyusunan dokumen draft Peta Rencana/Rencana Aksi SPBE.</li> <li>• Forum Group Discussion (FGD) dengan OPD terkait untuk validasi program.</li> <li>• Legalisasi dokumen melalui Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur.</li> </ul>
			1.2 Reviu Penyusunan Arsitektur PD (6 Domain Arsitektur)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan ulang Proses Bisnis (Probis) lintas sektor.</li> <li>• Inventarisasi dan pemutakhiran standar data dan metadata (Domain Data)</li> <li>• Reviu katalog aplikasi dan layanan publik digital (Domain Aplikasi &amp; Layanan)</li> <li>• Analisis kapasitas infrastruktur dan celah keamanan (Domain Infrastruktur &amp; Keamanan)</li> <li>• Penginputan/pemutakhiran data pada platform Arsitektur SPBE Nasional.</li> </ul>
			1.3 Pengisian SIAP Digital (Evaluasi Mandiri/Pemantauan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi indikator penilaian kematangan digital ke seluruh OPD.</li> <li>• Bimbingan teknis penyusunan bukti dukung (evidence) yang valid.</li> <li>• Pelaksanaan Penilaian Mandiri (Self-Assessment) oleh Tim Internal.</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifikasi dan validasi hasil penilaian mandiri oleh Asesor Internal.</li> <li>• Pendampingan saat proses evaluasi/audit eksternal (misal: oleh KemenPANRB).</li> </ul>
			1.4 Reviu tahunan Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dan pengukuran ketercapaian target per triwulan.</li> <li>• Analisis kendala dan hambatan pelaksanaan program tahun berjalan.</li> <li>• Rapat pleno evaluasi kinerja SPBE tahunan.</li> <li>• Penyusunan laporan hasil reviu dan rekomendasi tindak lanjut.</li> <li>• Penyesuaian prioritas anggaran/kegiatan untuk tahun berikutnya.</li> </ul>
2	Manajemen Layanan Digital Pemerintah	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	2.1 Penyusunan SOP ITSM (IT Service Management)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis gap layanan TI saat ini terhadap standar (misal: ITIL/ISO 20000).</li> <li>• Penyusunan dokumen katalog layanan TI.</li> <li>• Pembuatan SOP spesifik: Manajemen Insiden (Helpdesk), Manajemen Masalah, dan Manajemen Pemenuhan Permintaan.</li> <li>• Implementasi tools Service Desk/Ticketing System.</li> <li>• Pelatihan staf teknis mengenai alur kerja SOP baru.</li> </ul>
		Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel	2.2 Implementasi manajemen risiko digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi risiko SPBE (aset informasi, ancaman, dan kerentanan) pada OPD prioritas.</li> <li>• Analisis dampak dan probabilitas risiko (Penilaian Risiko).</li> <li>• Penyusunan dokumen Register Risiko dan Rencana Penanganan Risiko.</li> <li>• Pemantauan dan reviu berkala efektivitas mitigasi risiko.</li> <li>• Bimbingan teknis budaya sadar risiko bagi pimpinan OPD.</li> </ul>

		Biro Organisasi Setda Provinsi Sumsel	2.3 Penerapan Change Management (Manajemen Perubahan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis dampak perubahan implementasi aplikasi baru terhadap budaya kerja.</li> <li>• Penyusunan strategi komunikasi dan sosialisasi kebijakan transformasi digital.</li> <li>• Pembentukan "Agen Perubahan Digital" di setiap OPD.</li> <li>• Survei tingkat kesiapan dan resistensi pegawai terhadap adopsi teknologi.</li> <li>• Pendampingan transisi proses bisnis manual ke digital.</li> </ul>
		BPSDM Provinsi Sumsel	2.4 Knowledge sharing rutin (Manajemen Pengetahuan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan repositori pengetahuan digital (Knowledge Management System/Wiki Internal).</li> <li>• Penyelenggaraan forum rutin (misal: "Rabu Belajar" atau "Digital Talk") untuk berbagi best practice.</li> <li>• Dokumentasi lessons learned dari proyek/kegiatan digital yang telah selesai.</li> <li>• Kurasi materi pembelajaran digital yang dapat diakses mandiri oleh ASN.</li> </ul>

## 6.2. Strategi Penyelenggaraan Pemerintah Digital

Berikut merupakan Strategi Penyelenggaraan Pemerintah Digital yang disusun berdasarkan hasil identifikasi kondisi eksisting dan kebutuhan penguatan pada masing-masing indikator sebagaimana disajikan dalam Tabel 13.

**Tabel 13. Strategi Penyelenggaraan Pemerintah Digital**

NO	Project/Activities	UIC	Nama Kegiatan	Langkah Utama
3	Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital	Badan Kepegawaian Provinsi Sumsel	3.1 Penyusunan peta kompetensi digital ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan kamus kompetensi teknis bidang TIK dan literasi digital.</li> <li>• Pelaksanaan asesmen kompetensi digital (Digital Assessment) bagi seluruh ASN.</li> <li>• Analisis kesenjangan (gap analysis) antara kompetensi saat ini dengan kebutuhan arsitektur SPBE.</li> <li>• Penyusunan dokumen profil kompetensi digital ASN per Jabatan.</li> </ul>
4	Kolaborasi Pemerintah Digital	Bappeda Provinsi Sumsel	4.1 Pembentukan forum kolaborasi PD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi pemangku kepentingan (stakeholder) strategis unsur Pentahelix (Pemerintah, Akademisi, Badan Usaha, Masyarakat, Media).</li> <li>• Penyusunan dan penetapan SK Gubernur tentang Forum Smart City/Dewan TIK Daerah.</li> <li>• Rapat koordinasi perdana penyamaan visi dan misi forum.</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan jadwal dan agenda rutin pertemuan forum.</li> </ul>
--	--	--	--	---

### 6.3. Strategi Pembangunan Data Pemerintah Digital

Berikut merupakan Strategi Pembangunan data yang disusun berdasarkan hasil identifikasi kondisi eksisting dan kebutuhan penguatan pada masing-masing indikator sebagaimana disajikan dalam Tabel 14.

**Tabel 14. Strategi Pembangunan Data**

NO	Project/Activities	UIC	Nama Kegiatan	Langkah Utama
5	Tata Kelola Data (Indeks Satu Data Indonesia)	Bappeda Provinsi Sumsel	5.1 Pembentukan Penyelenggara SDI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan regulasi/SK Gubernur tentang Forum Satu Data Tingkat Daerah.</li> <li>• Penetapan Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah.</li> <li>• Penunjukan Walidata (biasanya Diskominfo) dan Walidata Pendukung di tiap OPD.</li> <li>• Rapat koordinasi rutin Forum Satu Data untuk menyepakati Daftar Data Prioritas tahunan.</li> </ul>
5	Tata Kelola Data (Indeks Satu Data Indonesia)	Bappeda Provinsi Sumsel	5.1 Pembentukan Penyelenggara SDI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dan penetapan SK Gubernur tentang Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung.</li> <li>• Pembentukan Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah.</li> <li>• Penyelenggaraan Rapat</li> </ul>

				<p>Forum Satu Data Daerah untuk menyepakati Daftar Data Prioritas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi peran dan tugas produsen data kepada seluruh OPD.</li> </ul>
6	<b>Operasional Pemanfaatan Informasi Geospasial</b>	<b>Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel</b>	<b>6.1 Integrasi peta ke layanan digital</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventarisasi dan kompilasi data spasial (Peta Dasar dan Peta Tematik) dari seluruh OPD.</li> <li>• Pembangunan atau optimalisasi Geoportal Daerah sebagai wadah berbagi pakai data spasial.</li> <li>• Pengembangan API (Service Map) untuk integrasi peta ke dalam aplikasi layanan publik (misal: Perizinan/OSS, Tata Ruang).</li> <li>• Pemutakhiran layer data spasial secara berkala.</li> </ul>
7	<b>Pembangunan Statistik (Indeks Pembangunan Statistik)</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel</b>	<b>7.1 Penyusunan rencana statistik sektoral</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dengan BPS (Pembina Data) terkait standar data statistik sektoral.</li> <li>• Identifikasi kebutuhan data statistik prioritas dari setiap OPD (Produsen Data).</li> <li>• Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik (Romantik) ke BPS sebelum survei dilaksanakan.</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dokumen metadata statistik sektoral secara lengkap.</li> </ul>
8	<b>Pelindungan Data Pribadi</b>	<b>Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel</b>	<b>8.1 Penyusunan kebijakan PDP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian akademis/hukum terkait implementasi UU PDP di lingkup Pemda.</li> <li>• Penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) atau Instruksi Gubernur tentang Pedoman Pelindungan Data Pribadi.</li> <li>• Penyusunan standar Privacy Policy (Kebijakan Privasi) dan Terms of Use untuk seluruh aplikasi layanan publik.</li> <li>• Sosialisasi hak dan kewajiban Subjek Data Pribadi kepada ASN dan masyarakat.</li> </ul>

#### 6.4. Strategi Keamanan Siber

Berikut merupakan Strategi Keamanan Siber yang disusun berdasarkan hasil identifikasi kondisi eksisting dan kebutuhan penguatan pada masing-masing indikator sebagaimana disajikan dalam Tabel 15.

**Tabel 15. Strategi Keamanan Siber**

<b>NO</b>	<b>Project/Activities</b>	<b>UIC</b>	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Langkah Utama</b>
9	<b>Pelaksanaan Audit Keamanan Siber dan Teknologi Pemerintah Digital</b>	<b>Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel</b>	<b>9.1 Pembentukan tim audit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventarisasi auditor internal yang memiliki latar belakang atau minat di bidang TI.</li> <li>• Peningkatan kompetensi auditor melalui sertifikasi profesi (misal: CISA, CISM, atau auditor SPBE terakreditasi).</li> <li>• Penerbitan SK Tim Audit TIK/SPBE di lingkungan Inspektorat.</li> <li>• Penyusunan Piagam Audit (Audit Charter) dan Pedoman Audit TIK Internal.</li> </ul>
10	<b>Keamanan Siber (Instrumen Pengukuran Kematangan Keamanan Siber dan Sandi)</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel</b>	<b>10.1 Self-assessment IKASANDI (Indeks KAMI)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan tim kerja asesmen mandiri keamanan informasi.</li> <li>• Identifikasi sistem elektronik strategis/tinggi risiko sebagai objek evaluasi.</li> <li>• Pengisian alat bantu evaluasi (Indeks KAMI) pada 5 area (Tata Kelola, Risiko, Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset, &amp; Teknis).</li> <li>• Verifikasi dan validasi hasil asesmen mandiri oleh BSSN.</li> </ul>

11	<b>Penerapan Kriptografi untuk Keamanan Data</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel</b>	<b>11.1 Implementasi TLS &amp; enkripsi DB</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan dan pengelolaan sertifikat elektronik (SSL/TLS) untuk seluruh domain layanan (.go.id).</li> <li>• Penerapan enkripsi pada jalur komunikasi data (Force HTTPS/HSTS) pada server aplikasi.</li> <li>• Implementasi enkripsi tingkat database (Transparent Data Encryption atau Column-level encryption) untuk data sensitif seperti NIK dan password.</li> <li>• Enkripsi pada media penyimpanan cadangan (backup storage).</li> </ul>
12	<b>Kapabilitas Penanganan Insiden Siber</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel</b>	<b>12.1 Pembentukan &amp; registrasi CSIRT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerbitan SK Gubernur/Kepala Dinas tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Gov-CSIRT).</li> <li>• Penyusunan dokumen profil CSIRT sesuai standar RFC 2350.</li> <li>• Proses registrasi dan verifikasi CSIRT Daerah ke BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara).</li> <li>• Launching dan sosialisasi layanan CSIRT kepada seluruh OPD (Konstituen).</li> </ul>

## 6.5. Strategi Teknologi digital

Berikut merupakan Strategi Teknologi Digital yang disusun berdasarkan hasil identifikasi kondisi eksisting dan kebutuhan penguatan pada masing-masing indikator sebagaimana disajikan dalam Tabel 16.

**Tabel 16. Strategi Teknologi Digital**

NO	Project/Activities	UIC	Nama Kegiatan	Langkah Utama
13	Aplikasi Pemerintah Digital	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	13.1 Penataan portofolio aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensus/Inventarisasi seluruh aplikasi yang tersebar di OPD (Web, Mobile, Desktop).</li> <li>• Asesmen teknis (kualitas kode, keamanan) dan asesmen fungsi (nilai bisnis) aplikasi eksisting.</li> <li>• Kategorisasi aplikasi berdasarkan strategi 4R (Retain, Refactor, Replatform, Retire).</li> <li>• Pendaftaran aplikasi ke dalam repositori GitHub/GitLab pemerintah provinsi (Code Repository).</li> </ul>
14	Infrastruktur Pemerintah Digital	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	14.1 Migrasi ke cloud/PDN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi dan klasifikasi aplikasi yang siap migrasi ke Pusat Data Nasional (PDN).</li> <li>• Penyusunan topologi deployment aplikasi pada lingkungan cloud.</li> <li>• Proses migrasi data dan aplikasi dari server lokal (on-premise) ke PDN atau Cloud Daerah.</li> <li>• Pengujian performa dan stabilitas aplikasi pasca-migrasi.</li> </ul>

## 6.6. Strategi Keterpaduan Layanan Digital

Berikut merupakan Strategi Keterpaduan Layanan Digital yang disusun berdasarkan hasil identifikasi kondisi eksisting dan kebutuhan penguatan pada masing-masing indikator sebagaimana disajikan dalam Tabel 17.

**Tabel 17. Strategi Keterpaduan Layanan Digital**

NO	Project/Activities	UIC	Nama Kegiatan	Langkah Utama
15	Keterpaduan Proses Bisnis Lintas Sektor	Biro Organisasi Setda Provinsi Sumsel	15.1 Pemetaan proses bisnis to-be	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventarisasi Proses Bisnis "As-Is" (kondisi saat ini) pada layanan lintas sektor.</li> <li>• Analisis penyederhanaan birokrasi dan penghapusan tahapan berulang.</li> <li>• Perancangan Peta Proses Bisnis "To-Be" (kondisi harapan) berbasis digital menggunakan standar BPMN.</li> <li>• Validasi dan penetapan Peta Proses Bisnis terintegrasi melalui Perkada/SK.</li> </ul>
16	Integrasi Aplikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	16.1 Pembangunan API gateway	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalasi dan konfigurasi perangkat lunak manajemen API (API Management Platform).</li> <li>• Implementasi mekanisme keamanan akses terpusat (OAuth2, API Key, atau JWT).</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendaftaran dan katalogisasi API (API Catalog) dari aplikasi OPD ke dalam gateway.</li> <li>• Pengaturan Rate Limiting dan Throttling untuk menjaga stabilitas lalu lintas data.</li> </ul>
17	<b>Portal Layanan Digital Pemerintah</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel</b>	<b>17.1 Pengembangan portal layanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perancangan antarmuka terpadu (Unified Interface) berbasis web dan mobile.</li> <li>• Implementasi fitur Single Sign-On (SSO) agar satu akun bisa untuk semua layanan.</li> <li>• Integrasi modul layanan prioritas (Kependudukan, Perizinan, Pajak, Kesehatan) ke dalam portal.</li> <li>• Penyediaan fitur personalisasi (profil pengguna dan riwayat layanan) bagi warga.</li> </ul>
18	<b>Interoperabilitas Data (Indeks Satu Data Indonesia)</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel</b>	<b>18.1 Integrasi SPLP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendaftaran service penghubung layanan daerah ke SPLP Nasional (Kemenkominfo).</li> <li>• Instalasi dan konfigurasi agen SPLP pada infrastruktur pusat data daerah.</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan modul/adapter aplikasi untuk mengonsumsi data dari SPLP Pusat (misal: Data Kependudukan).</li><li>• Uji konektivitas dan pertukaran data dua arah dengan instansi pusat/daerah lain.</li></ul>
--	--	--	--	---

## 6.7. Strategi Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah

Berikut merupakan Strategi Kepuasan Pengguna yang disusun berdasarkan hasil identifikasi kondisi eksisting dan kebutuhan penguatan pada masing-masing indikator sebagaimana disajikan dalam Tabel 18.

**Tabel 18. Strategi Kepuasan Pengguna**

NO	Project/Activities	UIC	Nama Kegiatan	Langkah Utama
19	Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	19.1 Implementasi service desk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan saluran bantuan multi-kanal (WhatsApp, Website, Telepon, Email) yang terpusat.</li> <li>• Instalasi dan konfigurasi aplikasi Ticketing System untuk mencatat dan melacak aduan.</li> <li>• Pembentukan struktur tim dukungan berjenjang (Tier 1: Admin/CS, Tier 2: Teknis/Developer).</li> <li>• Penyusunan Basis Pengetahuan (Knowledge Base/FAQ) yang dapat diakses mandiri oleh pengguna.</li> </ul>
20	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan	Dinas Komunikasi dan Informatika	20.1 Survei digital berkala	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan instrumen/kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</li> </ul>

	<p><b>Digital Pemerintah</b></p>	<p><b>ika Provinsi Sumsel</b></p>	<p>elektronik sesuai standar PermenpanRB.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrasi fitur pop-up survei singkat (star rating) setelah transaksi layanan selesai pada aplikasi.</li> <li>• Pelaksanaan survei kepuasan SPBE secara menyeluruh (semesteran/tahunan).</li> <li>• Verifikasi validitas data responden untuk menjamin objektivitas hasil.</li> </ul>
--	--------------------------------------	---	--

**BAB VII**  
**PETA RENCANA**  
**PEMERINTAH DIGITAL 2026–2030**

**7.1. Roadmap Tahunan (2026–2030)**

*Tabel 19. Roadmap tahunan (2026-2030)*

No	Project/Activities	UIC	Baseline	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Implementaasi Tata Kelola dan Manajemen Digital</b>								
<b>1</b>	<b>Tata Kelola Pemerintah Digital</b>							
	1.1	• Penyusunan Rencana Aksi PD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Sudah ada	✓				
	1.2	• Reviu Penyusunan Arsitektur PD (6 Domain Arsitektur) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Sudah ada	✓		✓		✓
	1.3	• Pengisian SIAP Digital Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Sebagian	✓				
	1.4	• Reviu tahunan Rencana Aksi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	sebagian		✓		✓	
<b>2</b>	<b>Manajemen Layanan Digital Pemerintah</b>							
	2.1	• Penyusunan SOP ITSM Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Belum ada	✓		✓		✓
	2.2	• Implementasi manajemen risiko digital Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel	Belum ada	✓	✓		✓	
	2.3	• Penerapan change management (Manajemen Perubahan) Biro Organisasi Setda Provinsi Sumsel	Belum ada	✓		✓		✓
	2.4	• Knowledge sharing rutin (Manajemen Pengetahuan) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Sumsel	Belum ada	✓	✓	✓	✓	
<b>Penerapan Penyelenggara Pemerintah Digital</b>								
<b>3</b>	<b>Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital</b>							
	3.1	• Penyusunan peta kompetensi digital ASN Badan Kepegawaian Provinsi Sumsel	Belum ada	✓		✓		
	3.2	• Pelatihan & sertifikasi digital Badan Kepegawaian Provinsi Sumsel	Sebagian	✓	✓	✓	✓	✓
	3.3	• Program literasi AI & Data Badan Kepegawaian Provinsi Sumsel	Sebagian		✓	✓	✓	✓

	3.4	• Komunitas belajar internal	Badan Kepegawaian Provinsi Sumsel	Belum ada	✓	✓	✓	✓	✓
<b>4</b>	<b>Kolaborasi Pemerintah Digital</b>								
	4.1	• Pembentukan forum kolaborasi PD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel	Sudah ada	✓	✓	✓	✓	✓
	4.2	• Kerja sama dengan kampus/industri	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel	sudah ada	✓	✓	✓	✓	✓
	4.3	• Hackathon / co-creation lab	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Belum ada	✓		✓		✓
	4.4	• Evaluasi kolaborasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel	Belum ada	✓		✓		✓
<b>Penggunaan Data Pemerintah Digital</b>									
<b>5</b>	<b>Tata Kelola Data (Indeks Satu Data Indonesia)</b>								
	5.1	• Pembentukan Penyelenggara SDI	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel	Sudah ada	✓		✓		
	5.2	• Penyusunan standar & metadata	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel	Sudah ada	✓	✓		✓	
	5.3	• Pengembangan portal data	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Sudah ada		✓	✓		✓
	5.4	• Evaluasi SDI	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel	Sudah ada		✓		✓	
<b>6</b>	<b>Operasional Pemanfaatan Informasi Geospasial (Indeks Jaringan Informasi Geospasial)</b>								
	6.1	• Integrasi peta ke layanan digital	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel	Belum ada		✓	✓		✓
	6.2	• Penyusunan SOP IG	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel	Belum ada	✓		✓		
	6.3	• Pelatihan SDM geospasial	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Sumsel	Belum ada		✓	✓	✓	✓
<b>7</b>	<b>Pembangunan Statistik (Indeks Pembangunan Statistik)</b>								
	7.1	• Penyusunan rencana statistik sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Sudah ada	✓		✓		
	7.2	• Integrasi data statistik ke sistem digital	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Terbatas		✓	✓		✓
	7.3	• Evaluasi EPSS	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Belum Rutin		✓		✓	
<b>8</b>	<b>Pelindungan Data Pribadi</b>								

	8.1	• Penyusunan kebijakan PDP	Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel	Belum ada	✓		✓		
	8.2	• Penunjukan DPO	SEKRETARIAT Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Belum ada	✓				
	8.3	• DPIA layanan digital	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Belum ada		✓	✓		✓
	8.4	• Audit kepatuhan PDP	Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel	Belum ada			✓		✓
<b>Penerapan Keamanan Siber</b>									
<b>9</b>	<b>Pelaksanaan Audit Keamanan Siber dan Teknologi Pemerintah Digital.</b>								
	9.1	• Pembentukan tim audit	Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel	Belum ada	✓				
	9.2	• Audit internal berkala	Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel	Belum ada		✓	✓		✓
	9.3	• Audit eksternal layanan prioritas	Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel	Belum ada			✓		✓
<b>10</b>	<b>Keamanan Siber (Instrumen Pengukuran Kematangan Keamanan Siber dan Sandi)</b>								
	10.1	• Self-assessment IKASANDI	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Sudah Berjalan	✓	✓	✓	✓	✓
	10.2	• Implementasi ISMS	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Belum Komprehensif		✓	✓		✓
	10.3	• Peningkatan kontrol teknis	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Sebagian	✓	✓	✓	✓	✓
<b>11</b>	<b>Penerapan Kriptografi untuk Keamanan Data (Instrumen Pengukuran Kematangan Keamanan Siber dan Sandi)</b>								
	11.1	• Implementasi TLS & enkripsi DB	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Sebagian	✓	✓	✓	✓	✓
	11.2	• Manajemen kunci kriptografi	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Belum Terpusat		✓	✓		✓
	11.3	• Evaluasi kriptografi	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Belum ada			✓		✓
<b>12</b>	<b>Kapabilitas Penanganan Insiden Siber (Instrumen Pengukuran Kematangan Keamanan Siber dan Sandi)</b>								
	12.1	• Pembentukan & registrasi CSIRT	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Sudah ada & Terdaftar	✓				
	12.2	• Penyusunan SOP IR	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Belum Terdokumentasi Formal	✓		✓		
	12.3	• Simulasi & latihan siber	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Belum Rutin		✓	✓		✓
<b>Pemanfaatan Teknologi Digital</b>									
<b>13</b>	<b>Aplikasi Pemerintah Digital</b>								
	13.1	• Penataan portofolio aplikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Sudah ada	✓	✓		✓	

	13.2	• Integrasi aplikasi prioritas	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Terbatas	✓	✓		✓
	13.3	• Terminasi aplikasi legacy	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Belum Sistematis		✓	✓	
<b>14</b>	<b>Infrastruktur Pemerintah Digital</b>							
	14.1	• Migrasi ke cloud/PDN	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Sebagian	✓	✓	✓	✓
	14.2	• Konsolidasi infrastruktur	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Belum Optimal	✓	✓		✓
	14.3	• Reviu arsitektur Infrastruktur	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Belum Periodik	✓		✓	✓
<b>Implementasi Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah</b>								
<b>15</b>	<b>Keterpaduan Proses Bisnis Lintas Sektor</b>							
	15.1	• Pemetaan proses bisnis to-be	Biro Organisasi Setda Provinsi Sumsel	Belum ada	✓	✓		✓
	15.2	• Digitalisasi arsip	Dinas Kearsipan Provinsi Sumsel	Belum sistematis	✓	✓	✓	✓
	15.3	• Integrasi lintas OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Terbatas	✓	✓	✓	✓
<b>16</b>	<b>Integrasi Aplikasi</b>							
	16.1	• Pembangunan API gateway	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Sudah ada	✓			
	16.2	• Standardisasi integrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Belum Konsisten		✓	✓	✓
	16.3	• Monitoring integrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Belum Berjalan			✓	✓
<b>17</b>	<b>Portal Layanan Digital Pemerintah</b>							
	17.1	• Pengembangan portal layanan	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Belum Terintegrasi	✓	✓		✓
	17.2	• Integrasi Portal Nasional	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Belum ada			✓	✓
	17.3	• Analasi UX	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Belum Diterapkan		✓	✓	✓
<b>18</b>	<b>Interoperabilitas Data (Indeks Satu Data Indonesia)</b>							
	18.1	• Integrasi SPLP	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Belum Berjalan		✓	✓	✓
	18.2	• Standardisasi data lintas OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Belum Konsisten	✓	✓		✓
	18.3	• Monitoring interoperabilitas	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Belum ada			✓	✓
<b>Implementasi Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah</b>								

19		Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah							
	19.1	• Implementasi service desk	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Belum ada	✓		✓		
	19.2	• Monitoring SLA real-time	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Belum ada		✓	✓		✓
	19.3	• Evaluasi layanan	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Belum ada			✓	✓	✓
20		Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah							
	20.1	• Survei digital berkala	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Belum ada		✓	✓	✓	✓
	20.2	• Publikasi hasil & tindak lanjut	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Belum ada			✓	✓	✓
	20.3	• Analisis sentimen berbasis AI	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Belum ada				✓	✓

## 7.2. Evaluasi dan Pengukuran Kepuasan Pemerintah Digital

### 7.2.1 Pengukuran Penilaian Pemerintah Digital

Untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat kemajuan implementasi pemerintah digital, digunakan sebuah kerangka kerja yang disebut Model Tingkat Kematangan (*Maturity Model*). Model ini membantu kita untuk memetakan posisi sebuah institusi dalam perjalanan transformasi digitalnya. Sebagaimana yang diilustrasikan pada tabel 20 di bawah, model ini menggunakan skala 5 (lima) tingkatan, mulai dari tahap paling dasar hingga tahap yang paling ideal. Setiap tingkatan merepresentasikan tahapan evolusi yang spesifik dalam penerapan sistem digital. Mari kita telaah makna dari setiap tingkatan tersebut.

- **Memahami Lima Tingkat Kematangan**

Model ini menyediakan sebuah peta jalan yang jelas bagi lembaga pemerintah untuk menilai kondisi mereka saat ini dan merencanakan langkah-langkah perbaikan di masa depan. Berikut adalah penjabaran dari setiap tingkatan:

#### ***Tingkat 1: Rintisan***

Pada tingkat **Rintisan**, implementasi sistem digital masih berada pada tahap awal dan bersifat sporadis. Kegiatan yang dilakukan cenderung reaktif, tanpa didasari oleh pedoman yang jelas atau perencanaan yang terarah. Bisa diibaratkan, pada tahap ini, lembaga baru mulai mencoba-coba membangun sesuatu tanpa memiliki cetak biru (blueprint) yang pasti.

### ***Tingkat 2: Terkelola***

Di tingkat **Terkelola**, lembaga sudah mulai menunjukkan kemajuan. Implementasi telah berjalan sesuai dengan pedoman dan program yang telah direncanakan. Namun, penerapannya belum menyeluruh; masih ada beberapa proses atau lingkup kerja yang belum tersentuh oleh standarisasi ini. Artinya, sudah ada pedoman, tetapi belum diaplikasikan secara konsisten di semua bagian.

### **Tingkat 3: Terstandarisasi**

Tingkat **Terstandarisasi** menunjukkan bahwa lembaga telah berhasil menerapkan pedoman dan program secara komprehensif di seluruh proses dan lingkup organisasinya. Pada tahap ini, terdapat konsistensi dalam implementasi di berbagai unit kerja, menciptakan sebuah fondasi yang solid dan seragam untuk operasional digital.

### ***Tingkat 4: Terintegrasi/Terpadu***

Pada tingkat **Terintegrasi/Terpadu**, fokusnya bergeser dari standarisasi internal ke keterpaduan eksternal. Implementasi tidak hanya konsisten, tetapi juga saling terhubung secara nasional antar sistem atau lembaga. Selain itu, proses **reviu dan evaluasi berkala** mulai dilakukan secara sistematis untuk memastikan semua komponen bekerja secara harmonis dan sesuai dengan tujuan yang lebih besar.

### ***Tingkat 5: Optimum***

Ini adalah tingkatan tertinggi dalam model kematangan. Pada tingkat **Optimum**, lembaga tidak lagi hanya menjalankan sistem, tetapi secara proaktif melakukan **optimalisasi kapabilitas** berdasarkan data dan hasil evaluasi. Proses perbaikan terjadi secara berkelanjutan (*continuous improvement*), menjadikan implementasi pemerintah digital lebih efisien, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di tahap ini, inovasi berbasis data menjadi pendorong utama.

Dengan memahami kelima tingkatan ini, sebuah lembaga dapat mengidentifikasi kelemahannya, menetapkan target yang realistis, dan menyusun strategi yang efektif untuk mencapai tingkat kematangan pemerintah digital yang lebih tinggi.

**Tabel 20. Pengukuran Tingkat Kematangan dengan Skala 5**

Pengukuran Tingkat Kematangan dengan Skala 5 (Aspek 1 s.d. 8)		
Tingkat Kematangan	Kriteria	Penjelasan
1	Rintisan	Implementasi tanpa pedoman dan tanpa perencanaan yang terarah
2	Terkelola	Implementasi sesuai pedoman dan program yang terarah, namun belum komprehensif untuk semua proses dan lingkup
3	Terstandarisasi	Implementasi secara komprehensif untuk semua proses dan lingkup sesuai pedoman dan program yang terarah
4	Terintegrasi/Terpadu	Implementasi integrasi/keterpaduan nasional, dilakukan reviu/evaluasi berkala
5	Optimum	Optimalisasi kapabilitas implementasi berdasarkan hasil reviu/evaluasi

### 7.2.2 Skala Penilaian Kepuasan Pengguna

Selain mengukur kematangan dari perspektif internal (penyedia layanan), evaluasi juga harus mengukur persepsi dari perspektif eksternal (pengguna). Untuk tujuan ini, digunakan "Skala Penilaian Kepuasan Pengguna" pada tabel 21 yang berfokus pada analisis **nilai bersih (net value)** yang dirasakan oleh pengguna.

Metodologi ini didasarkan pada perhitungan selisih antara persepsi positif (keuntungan) dan persepsi negatif (biaya atau risiko).

**Tabel 21. Skala Penilaian Kepuasan Pengguna**

Skala Penilaian Kepuasan Pengguna				
Persepsi Keuntungan dan Manfaat (k)				
1	2	3	4	5
Sangat Buruk	Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik
Persepsi Biaya dan Risiko (b)				
5	4	3	2	1
Sangat Buruk	Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik
Net sum Persepsi ( k – b )				
-4	-2	0	2	4

Kondisi yang terjadi ketika responden menilai Persepsi Keuntungan dan Manfaat berada pada kategori sangat buruk dan Persepsi Biaya dan Risiko juga sangat buruk	(kondisi antara)	(kondisi netral)	(kondisi antara)	Kondisi yang terjadi ketika responden menilai persepsi keuntungan dan manfaat berada pada kategori sangat baik dan Persepsi Biaya dan Risiko juga sangat baik
Keterangan: Nilai Range -4 hingga 4 dari pengurangan skor hasil kuesioner dari 2 (dua) persepsi.				

### A. Komponen Penilaian

Model ini dibangun di atas tiga komponen utama:

- 1. Persepsi Keuntungan dan Manfaat (k)** Variabel ini mengukur penilaian positif pengguna terhadap layanan. Responden memberikan nilai berdasarkan seberapa besar keuntungan atau manfaat yang mereka peroleh. Penilaian menggunakan skala 5 poin, di mana skor tertinggi (**5: Sangat Baik**) merepresentasikan persepsi manfaat terbesar.
- 2. Persepsi Biaya dan Risiko (b)** Variabel ini mengukur penilaian negatif pengguna, seperti biaya, usaha, atau risiko yang harus dikeluarkan. Skala ini diterapkan secara **terbalik** untuk tujuan kalkulasi. Dalam skala ini, nilai **1 (Sangat Baik)** justru merepresentasikan persepsi biaya atau risiko yang sangat rendah, yang merupakan kondisi ideal bagi pengguna. Sebaliknya, nilai **5 (Sangat Buruk)** merepresentasikan biaya atau risiko yang sangat tinggi.
- 3. Net sum Persepsi (k – b)** Ini adalah metrik inti yang digunakan untuk mengkuantifikasi kepuasan bersih. Skor ini diperoleh melalui pengurangan skor **Persepsi Biaya dan Risiko (b)** dari skor **Persepsi Keuntungan dan Manfaat (k)**.

$$\text{Net sum Persepsi} = k - b$$

Hasil perhitungan akan menghasilkan skor dalam rentang nilai **-4** hingga **+4**.

### B. Interpretasi Skor Net sum

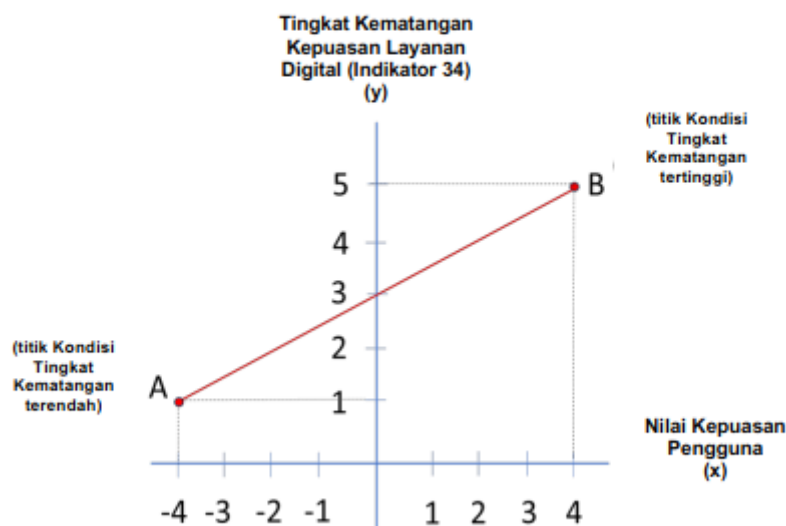
- Skor +4 (Kondisi Optimum):** Mewakili skenario kepuasan tertinggi. Ini terjadi ketika responden menilai **Keuntungan (k=5)** sebagai "Sangat Baik" dan **Biaya/Risiko (b=1)** juga sebagai "Sangat Baik" (artinya, biaya/risiko sangat rendah).
- Skor 0 (Kondisi Netral):** Menunjukkan kondisi di mana persepsi keuntungan dan biaya/risiko berada dalam keseimbangan (misalnya, k=3 dan b=3). Layanan dianggap memadai, namun tidak memberikan nilai tambah yang signifikan.

- **Skor -4 (Kondisi Sangat Buruk):** Mewakili skenario kepuasan terendah. Ini terjadi ketika responden menilai **Keuntungan (k=1)** "Sangat Buruk" sementara **Biaya/Risiko (b=5)** dinilai "Sangat Buruk" (artinya, biaya/risiko sangat tinggi).

Penggunaan "Net sum Persepsi" memungkinkan analis untuk mendapatkan gambaran holistik mengenai kepuasan pengguna, karena model ini menimbang secara seimbang antara apa yang diperoleh pengguna (manfaat) dan apa yang harus mereka keluarkan (biaya/risiko).

### 7.2.3 Translasi Skala: Menghubungkan Kepuasan Pengguna dengan Tingkat Kematangan

Translasi Skala :



**Gambar 4. Translasi Skala Menghubungkan Kepuasan Pengguna dengan Tingkat Kematangan**

Untuk menghitung dan mengonversi nilai tersebut, digunakan digunakan teori linear transformation dengan persamaan  $f(x)=ax+b$  atau  $y = ax+b$  (Giuseppe Peano, 1888)

Setelah kita memahami dua model penilaian yang terpisah—**Tingkat Kematangan Layanan** (Skala 1 s.d. 5) dan **Nilai Kepuasan Pengguna** (Skala -4 s.d. +4)—langkah selanjutnya adalah menghubungkan kedua hasil pengukuran tersebut. Tujuan dari "Translasi Skala" ini adalah untuk mengonversi skor kepuasan pengguna ke dalam bahasa yang setara dengan tingkat kematangan layanan.

Grafik "Translasi Skala" mengilustrasikan bagaimana dua skala yang berbeda ini dipetakan satu sama lain.

- Sumbu horizontal (**x**) merepresentasikan **Nilai Kepuasan Pengguna**, dengan rentang dari -4 hingga +4.
- Sumbu vertikal (**y**) merepresentasikan **Tingkat Kematangan Kepuasan Layanan Digital**, dengan rentang dari 1 hingga 5.

### A. Logika Transformasi Linear

Untuk menghitung dan mengonversi nilai antara dua skala ini, digunakan teori transformasi linear, yang pertama kali diperkenalkan oleh Giuseppe Peano (1888). Metode ini mengasumsikan adanya hubungan linear (garis lurus) yang proporsional antara kedua variabel.

Persamaan yang digunakan adalah:  $y = ax + b$

Dimana:

- **y** adalah **Tingkat Kematangan Kepuasan Layanan Digital** (nilai yang ingin kita cari).
- **x** adalah **Nilai Kepuasan Pengguna** (skor *net sum* k-b).
- **a** adalah gradien atau koefisien kemiringan garis.
- **b** adalah intersep atau titik potong pada sumbu y.

### B. Menentukan Titik Ekstrem

Seperti yang terlihat pada grafik, kita dapat menentukan dua titik ekstrem yang menghubungkan kedua skala:

1. **Titik A (Kondisi Terendah):** Merepresentasikan kondisi di mana **Nilai Kepuasan Pengguna (x)** berada pada titik terendah, yaitu **-4**. Nilai ini ditranslasikan menjadi **Tingkat Kematangan (y)** terendah, yaitu **1**.
  - Koordinat Titik A = **(-4, 1)**
2. **Titik B (Kondisi Tertinggi):** Merepresentasikan kondisi di mana **Nilai Kepuasan Pengguna (x)** berada pada titik tertinggi, yaitu **+4**. Nilai ini ditranslasikan menjadi **Tingkat Kematangan (y)** tertinggi, yaitu **5**.
  - Koordinat Titik B = **(4, 5)**

Dengan menggunakan dua titik koordinat ini (Titik A dan Titik B), kita dapat menghitung nilai **a** (gradien) dan **b** (intersep) untuk menemukan rumus konversi yang pasti. Proses translasi skala ini memungkinkan lembaga untuk "menerjemahkan" skor kepuasan pengguna yang abstrak (misalnya, +2.5) menjadi sebuah indikator tingkat kematangan yang lebih mudah dipahami dan dapat ditindaklanjuti (misalnya, setara dengan Tingkat 3.5)

## 7.2.4 Konversi Nilai Kepuasan Pengguna ke Tingkat Kematangan

Setelah memahami konsep transformasi linear, langkah praktis selanjutnya adalah menerjemahkan skor *Net sum Persepsi* (yang berada pada rentang -4 hingga +4) ke dalam skala diskret Tingkat Kematangan (1 hingga 5). Tabel 22 "Konversi Nilai Kepuasan Pengguna ke Tingkat Kematangan Kepuasan Layanan Digital" berfungsi sebagai panduan praktis untuk konversi ini. Tabel ini membagi rentang skor kepuasan pengguna menjadi lima interval yang telah ditentukan, di mana setiap interval berkorespondensi dengan satu tingkat kematangan dan sebuah predikat kualitatif.

### A. Pembacaan Tabel Konversi

Tabel 22 ini menyajikan tiga kolom utama yang saling terkait:

No	Nilai Kepuasan Pengguna	Tingkat Kepuasan Layanan Digital (Indikator 34)	Predikat
1	< 2,4	1	Sangat Buruk
2	-2,4 s.d. < -0,8	2	Buruk
3	-0,8 s.d. < 1	3	Cukup
4	1 s.d. < 2,4	4	Baik
5	2,4 s.d. 4,0	5	Sangat Baik

**Tabel 22. Konversi Nilai Kepuasan Pengguna**

1. **Nilai Kepuasan Pengguna:** Ini adalah skor mentah yang diperoleh dari perhitungan *Net sum Persepsi* ( $k - b$ ).
2. **Tingkat Kepuasan Layanan Digital (Indikator 34):** Ini adalah nilai konversi yang setara pada skala 1-5, yang menyelaraskan persepsi pengguna dengan model kematangan layanan.
3. **Predikat:** Ini adalah deskriptor kualitatif yang merangkum hasil penilaian untuk memudahkan interpretasi.

### B. Rincian Interval Konversi

- **Tingkat 1: Sangat Buruk** Layanan dikategorikan pada tingkat terendah jika skor *Net sum Persepsi* yang diperoleh pengguna berada di bawah -2,4. Ini menunjukkan ketidakpuasan yang sangat signifikan, di mana persepsi biaya dan risiko jauh melampaui manfaat yang dirasakan.
- **Tingkat 2: Buruk** Sebuah layanan dinilai "Buruk" ketika skor kepuasan pengguna berada dalam rentang -2,4 hingga kurang dari -0,8. Pada level ini, pengguna masih merasa lebih banyak dirugikan daripada diuntungkan.

- **Tingkat 3: Cukup** Tingkat ini mewakili kondisi netral atau rata-rata. Skor yang diperoleh berada di antara -0,8 hingga kurang dari 1. Ini mengindikasikan bahwa manfaat yang dirasakan pengguna seimbang atau hanya sedikit lebih baik daripada biaya dan risiko yang dikeluarkan.
- **Tingkat 4: Baik** Layanan dinilai "Baik" ketika skor kepuasan menunjukkan nilai positif yang jelas, yaitu dalam rentang 1 hingga kurang dari 2,4. Pengguna secara nyata merasakan manfaat layanan telah melampaui biaya dan risiko.
- **Tingkat 5: Sangat Baik** Ini adalah predikat tertinggi, yang dicapai ketika skor *Net sum Persepsi* berada pada rentang 2,4 hingga 4,0. Ini menunjukkan bahwa pengguna merasakan nilai dan manfaat yang sangat tinggi dari layanan, sementara persepsi terhadap biaya dan risiko sangat minim.

Dengan adanya tabel konversi ini, evaluator dapat dengan cepat dan standar menerjemahkan data kuantitatif kepuasan pengguna menjadi sebuah predikat yang lugas dan dapat ditindaklanjuti, yang juga selaras dengan kerangka kerja evaluasi kematangan secara keseluruhan.

## BAB VIII

### PENUTUP

#### 8.1. Penegasan Visi dan Pijakan Awal Transformasi

Kondisi Pemerintah Digital saat ini mencerminkan sebuah paradoks pembangunan. Di satu sisi, daerah telah memiliki modalitas infrastruktur dan teknologi yang sangat kuat (Indeks Teknologi Digital: 4,00), namun di sisi lain masih menghadapi tantangan fundamental pada aspek Data, Keamanan, dan Manajemen Layanan yang masih berada pada level rintisan (Indeks rata-rata: 1,00).

Oleh karena itu, visi transformasi dalam Peta Rencana ini menegaskan pergeseran paradigma (shifting paradigm): dari sekadar "Digitalisasi Aset" (pembelian infrastruktur/aplikasi) menuju "Digitalisasi Ekosistem". Pijakan awal transformasi tidak lagi dimulai dari nol, melainkan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada untuk menyelesaikan "utang" tata kelola pada sektor keamanan siber dan interoperabilitas data. Transformasi ini bukan tentang seberapa banyak aplikasi yang dibangun, melainkan seberapa aman dan terpadunya layanan yang dirasakan oleh pengguna.

#### 8.2. Rekomendasi Strategis untuk Kepemimpinan Daerah

Untuk menjembatani kesenjangan (*gap*) yang ekstrem antara kecanggihan teknologi dengan rendahnya kualitas data dan keamanan, Kepemimpinan Daerah direkomendasikan untuk mengambil langkah intervensi strategis sebagai berikut:

- **Prioritas Keamanan Siber (Security First):** Mengingat seluruh indikator keamanan siber berada pada level 1, pimpinan daerah wajib mengalokasikan anggaran khusus untuk pemenuhan standar keamanan informasi (Audit Keamanan, Penerapan Kriptografi, dan CSIRT). Pembangunan aplikasi baru harus dihentikan sementara (*moratorium*) jika standar keamanan belum terpenuhi.
- **Penguatan Tata Kelola Data (Data Driven):** Fokus kebijakan diarahkan pada implementasi Satu Data Indonesia. Pimpinan harus mendorong pembukaan "sekat-sekat" data antar Perangkat Daerah (interoperabilitas) agar teknologi yang ada dapat menghasilkan kebijakan berbasis data, bukan sekadar laporan administratif.
- **Integrasi Layanan (Citizen Centric):** Mengubah orientasi dari pengembangan aplikasi per-sektor menjadi pengembangan Portal Layanan Terpadu. Target utamanya adalah meningkatkan kepuasan pengguna (masyarakat) yang saat ini masih rendah, dengan menyediakan satu pintu akses layanan digital yang mudah dan terukur.

### 8.3. Komitmen dan Parameter Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan Peta Rencana Pemerintah Digital ini tidak dinilai dari penyerapan anggaran belanja TIK, melainkan diukur melalui parameter keberhasilan (*Key Performance Indicators*) yang mengikat komitmen seluruh Perangkat Daerah:

1. Peningkatan Indeks SPBE & Pemdi: Target kenaikan Indeks Pemerintah Digital dari 1,67 (Kurang) menjadi minimal kategori Baik dalam periode perencanaan, didorong oleh kenaikan signifikan pada domain Data dan Manajemen.
2. Terwujudnya Keterpaduan: Keberhasilan diukur dari berkurangnya jumlah aplikasi yang berdiri sendiri (*silo*) dan meningkatnya jumlah layanan yang terintegrasi penuh ke dalam Portal Layanan Publik dan Portal Administrasi Pemerintahan.
3. Ketahanan Siber yang Teruji: Tidak adanya insiden kebocoran data strategis dan terpenuhinya standar audit keamanan pada seluruh sistem elektronik vital daerah.

Komitmen ini menuntut kolaborasi lintas sektor; di mana Dinas Kominfo bertindak sebagai *Chief Information Officer* (CIO) yang mengorkestrasi standar, sementara Perangkat Daerah lain bertindak sebagai produsen data dan pengguna layanan yang patuh pada arsitektur yang ditetapkan.



**panrb**  
KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN